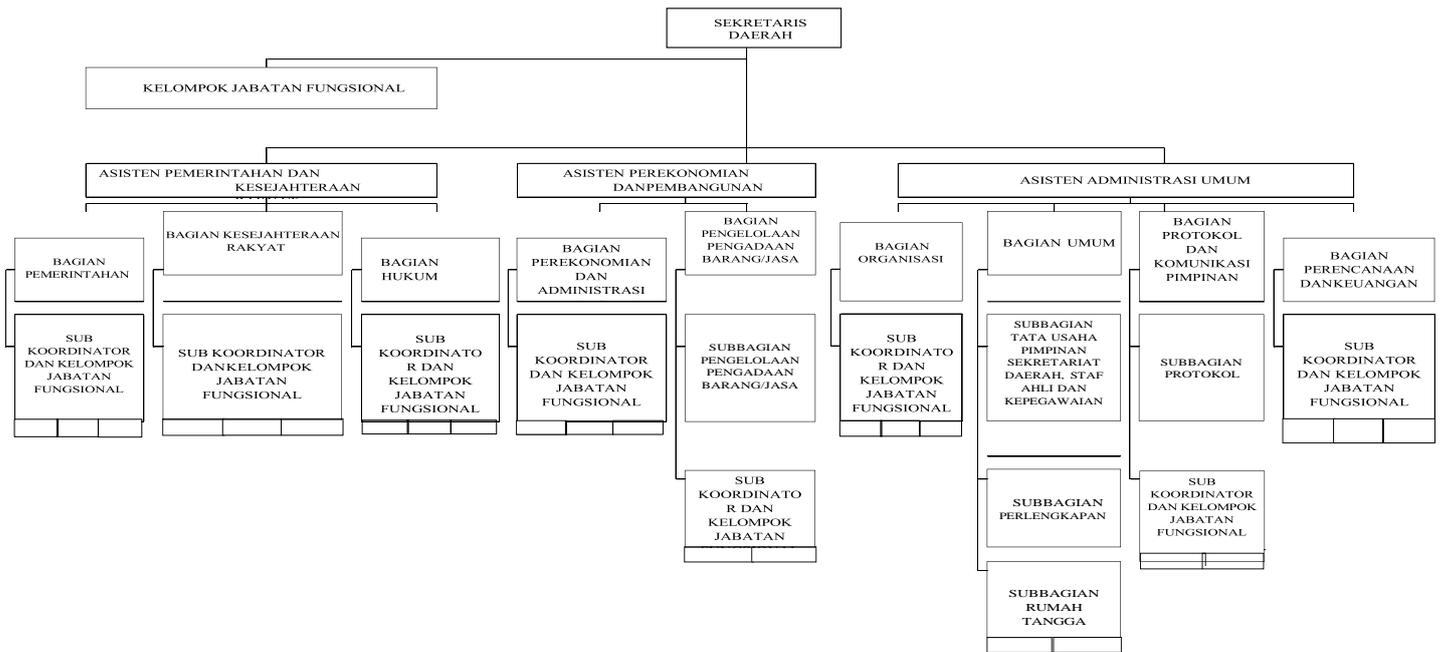


**I. Data Umum Perangkat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya dilakukan beberapa revisi terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan tahun 2021 dilakukan perubahan kelembagaan Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur. (Struktur Organisasi Terlampir) yang terdiri dari : 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 9 Bagian, 5 SubBagian, 8 SubKoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat diuraikan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**



### 1.4.1 Jumlah PNS

Pada Tahun 2022 Jumlah PNS pada Sekretariat Daerah Luwu Timur sebanyak 80 orang dan 75 Tenaga Upah Jasa. pada Tabel 1.1 disajikan data Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, dan pada Tabel 1.2 disajikan data Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin dan Tabel 3.1 disajikan data Jumlah Fungsional berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.

**Tabel 1.1**

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IV	8	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	11	7
2	III	2	2	22	20	4	1	1	1	-	-	-	-	29	24
3	II	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	7
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0
5	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Upah Jasa	-	-	9	11	-	-	32	12	2	1	3	5	46	29

Sumber : Kepegawaian Sekretariat Daerah Tahun 2023

**Tabel 1.2**

#### Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

No.	Pejabat Struktural/ Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IIa	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	IIb	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
3	IIIa	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
4	IVa	0	0	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	Jumlah	6	3	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6

Sumber : Kepegawaian Sekretariat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Struktur Organisasi Pada Sekretariat Daerah Pejabat Struktural/Eselon terdiri 1 (satu) orang Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Orang Asisten, 8 Orang Kepala Bagian dan 4 orang kepala Sub Bagian, pada Tahun 2023 Jumlah Pejabat Struktural/Eselon sebanyak 20 Orang yang terdiri dari **Eselon IIa** 1 (satu) orang pendidikan S2, **Eselon IIb** 4 (empat) orang Pendidikan S2 dan 1 (satu) orang Pendidikan S1, **Eselon IIIa** 3 (tiga) orang pendidikan S2 dan 5 (lima) orang pendidikan S1, **Eselon IVa**, 4 (empat) orang pendidikan S1, sesuai Dengan tabel di atas.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pejabat Fungsional berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022**

No.	Pejabat Fungsional	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												Total	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Pengelola Pengadaan barang dan Jasa	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
2	Fungsional Penyetaraan	2	2	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7
	Jumlah	-	2	19	7	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8

Sumber : Kepegawaian Sekretariat Daerah Tahun 2023

Jumlah Pejabat fungsional pada Sekretariat Daerah sebanyak 23 Orang terdiri dari 7 Orang Fungsional Pengelolaan Barang dan Jasa dan 16 Orang Fungsional Penyetaraan.

## II. DATA PERUBAHAN RKPD DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu untuk Pendapatan sebelum Perubahan Anggaran sebesar Rp152.529.000,00 dan sesudah Perubahan Anggaran sebesar Rp135.779.000,00 atau berkurang sebesar Rp16.750.000,00 atau 10,98% dan untuk Belanja sebelum Perubahan sebesar Rp65.415.826.750,00 dan sesudah Perubahan Anggaran sebesar Rp84.909.694.397,00 atau Bertambah sebesar Rp19.493.867.647,00 atau 29,79% dengan Rincian Belanja Operasi sebelum Perubahan Anggaran sebesar Rp60.675.326.750,00 dan Belanja Operasi sesudah Perubahan Anggaran sebesar Rp77.677.914.289,00 dan Belanja Modal Sebelum Perubahan sebesar Rp4.740.500,00, Belanja Modal Sesudah Perubahan sebesar Rp7.231.780.108,00.

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perubahan Pendapatan**

1	2	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/BERKURANG		KETERANGAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5=3-4	6=5/3*100		
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	Retribusi Daerah		152,529,000.00	135,779,000.00	16,750,000.00	10.98	
1.1	Retribusi Jasa Usaha		152,529,000.00	135,779,000.00	16,750,000.00	10.98	
1.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		152,529,000.00	135,779,000.00	16,750,000.00	10.98	
1.1	1.1	Retribusi Penyewaan Tanah	52,529,000.00	55,779,000.00	3,250,000.00	(6.19)	Penambahan Pada Tarif Sewa Tanah untuk ATM BPD
1.2	1.2	Retribusi Penyewaan Bangunan	100,000,000.00	80,000,000.00	(20,000,000.00)	(20.00)	Pengurangan Untuk Penyewaan Pada Mess Makassar dan Penyewaan Gedung Simpursiang

**Tabel 2.2**  
**Perubahan Belanja**

1	2	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/BERKURANG		KETERANGAN
			POKOK	PERUBAHAN	Rp	%	
1	2	3	4	5=3-4	6=5/3*100		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		32,608,076,350.00	32,481,262,197.00	126,814,153.00	0.39	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		166,738,600.00	196,508,600.00	(29,770,000.00)	(17.85)	Penambahan Biaya Perjalanan Dinas Untuk Kegiatan Coaching Penganggaran
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13,842,398,892.00	10,717,425,320.00	3,124,973,572.00	22.58	Penyesuaian Gaji dan TPP pada Jabatan Struktural dan Fungsional yang kosong
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		108,533,200.00	126,433,200.00	(17,900,000.00)	(16.49)	Penambahan Biaya Perjalanan Dinas
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		20,000,000.00	35,040,000.00	(15,040,000.00)	(75.20)	Penambahan Biaya Perjalanan Dinas
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		167,571,585.00	185,571,585.00	(18,000,000.00)	(10.74)	Penambahan Biaya Kontribusi Kegiatan Bimtek
1.6	Administrasi Umum Perangkat daerah		2,912,812,605.00	3,471,198,065.00	(558,385,460.00)	(19.17)	Penambahan Pengadaan Karpet Ruangan Bupati,, Wakil Bupati dan Sekda dan Pemanbahaan Biaya Perjalanan Dinas
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4,645,000,000.00	6,173,672,646.00	(1,528,672,646.00)	(32.91)	Penambahan Pengadaan Kendaraan Dinas SEKDA, Pengadaan AC Ruang Staf Ahli, Ruangan Staf Bupati, dan Rujab Bupati, Belanja Video Wall di Aula Sasana Praja.
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,531,058,684.00	1,523,458,684.00	7,600,000.00	0.50	Pengurangan Belanja Telepon
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,160,835,395.00	3,569,642,462.00	(1,408,807,067.00)	(65.20)	Penambahan DPAL Belanja Rehab Gedung Kantor, Pengawasan Rehab Gedung kantor, Pemeliharaan Rujab Bupati, Wakil Bupati, Pos Jaga Rujab KDH, Rujab WKDH dan Rujab Sekda.
1.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil Daerah		3,338,447,113.00	2,912,183,213.00	426,263,900.00	12.77	Penyesuaian Gaji, BOP KDH/WKDH dan Belanja Bimtek, Perlanan Dinas

	URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/BERKURANG		KETERANGAN
		POKOK	PERUBAHAN	Rp	%	
						Luar Negeri KDH/WKDH
1.11	Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	1,764,942,000.00	1,415,742,000.00	349,200,000.00	19.79	Penyesuaian Belanja Rumah Tangga WKDH
1.12	Penataan Organisasi	1,117,363,300.00	1,117,363,300.00	0.00	0.00	
1.13	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	832,374,976.00	1,037,023,122.00	(204,648,146.00)	(24.59)	Penambahan Biaya Pengawasan Pimpinan dan Penambahan Biaya Perjalanan Dinas
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	31,072,690,747.00	50,048,357,547.00	(18,975,666,800.00)	(61.07)	
2.1	Administrasi Tata Pemerintahan	500,489,100.00	447,379,100.00	53,110,000.00	10.61	Penyesuaian Belanja Makan Minum Kegiatan dan Perjalanan Dinas
2.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	29,777,541,747.00	48,557,432,547.00	(18,779,890,800.00)	(63.07)	Penambahan Anggaran Belanja Beasiswa Brepresiasi, Kegiatan Peparawi dan Bantuan untuk Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan
2.3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	707,998,000.00	964,204,000.00	(256,206,000.00)	(36.19)	Penambahan Biaya Jasa Pendampingan Hukum dan Biaya Perjalanan Dinas
2.4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	86,661,900.00	79,341,900.00	7,320,000.00	8.45	Penyesuaian Belanja Makan dan Minum
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,735,059,653.00	2,380,074,653.00	(645,015,000.00)	(37.18)	
3.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	421,186,806.00	678,571,806.00	(257,385,000.00)	(61.11)	Penambahan Belanja Konsultasi Penyusunan Rencana kerja BUMD, Biaya Seleksi Direksi dan Komisaris BUMD, Biaya Publikasi dan Belanja Perjalanan Dinas
3.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	112,163,162.00	122,663,162.00	(10,500,000.00)	(9.36)	Penambahan Biaya Perjalanan Dinas
3.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,126,618,610.00	1,473,258,610.00	(346,640,000.00)	(30.77)	Penambahan Pelatihan Kompetensi PBJP Untuk PPK dan Biaya Perjalanan Dinas
3.4	Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	75,091,075.00	105,581,075.00	(30,490,000.00)	(40.60)	Penambahan Biaya Perjalanan Dinas

#### 1.4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target dan realisasi Pendapatan menurut jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Daerah disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

#### Target dan Realisasi Pendapatan Sekretariat Daerah Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>135.779.000,00</b>	<b>152.979.000,00</b>	<b>112,66</b>
1	Retribusi Jasa Usaha	135.779.000,00	152.979.000,00	112,66
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135.779.000,00	152.979.000,00	112,66
	<i>Retribusi Penyewaan Tanah</i>	<i>55.779.000,00</i>	<i>66.300.000,00</i>	<i>118,86</i>
	<i>Retribusi Penyewaan Bangunan</i>	<i>80.000.000,00</i>	<i>97.200.000,00</i>	<i>121,50</i>

Sumber : LRA Sekretariat Daerah Tahun 2023

Target Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah tahun 2023 Rp135.779.000,00 dengan Realisasi Rp152.979.000,00 dengan capaian 112,66%. Realisasi Pendapatan melebihi target dikarenakan permintaan penyewaan gedung oleh masyarakat mengalami kenaikan.

#### 1.4.3 Target dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Target dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Daerah disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Target dan Realisasi Belanja**  
**Sekretariat Daerah Tahun 2023**

No.	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>BELANJA</b>	<b>84.909.694.397,00</b>	<b>79.027.645.800,47</b>	<b>93.07</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>77.677.914.289,00</b>	<b>71.861.103.357,56</b>	<b>92.51</b>
	Belanja Pegawai	11.146.415.533,00	10.881.460.075,00	97.62
	Belanja Barang dan Jasa	45.006.498.756,00	40.308.643.282,56	89.56
	Belanja Hibah	19.925.000.000,00	19.475.000.000,00	97.74
	Belanja Bantuan Sosial	1.600.000.000,00	1.196.000.000,00	74.75
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>7.231.780.108,00</b>	<b>7.166.542.442,91</b>	<b>99.10</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.047.872.646,00	5.996.501.646,00	99.15
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	968.907.462,00	963.750.358,51	99.47
	Belanja Modal Jaringan dan Irigasi	215.000.000,00	206.290.438,40	95.95

Sumber : LRA Sekretariat Daerah Tahun 2023

Anggaran Perubahan Pada Sekretariat Daerah Tahun 2023 sebesar **Rp84.909.694.397,00** dengan Realisasi **Rp79.027.645.800,47** dengan capaian **93,07%**. yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp77.677.914.289,00** dengan Realisasi **Rp71.861.103.357,56** dengan capaian **92,51%** dan Belanja Modal **Rp7.231.780.108,00** dengan realisasi **Rp7.166.542.442,91** dengan Capaian **99,10%**.

## BAB III

## HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. URUSAN PENUNJANG  
URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH

## 1. TUJUAN DAN SASARAN

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dan Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	68,22%	74,40%	109,05%
	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah	95,00%	99,18%	104,40%

Sumber: Sekretariat Daerah Tahun 2022

Dari pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran****Meningkatnya Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dan Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Daerah**

Sasaran Sekretariat Daerah memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yang mendukung tercapainya sasaran perangkat daerah yakni:

- a. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Tabel 3.2

Nilai Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan 2022

NO	UNIT KERJA	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
	Sekretariat Daerah	70,18	BB	74,40	BB

Sumber: Inspektorat Kab.Luwu Timur

Dari Tabel di atas menunjukkan Nilai Sakip Sekretariat Daerah mengalami peningkatan dari Tahun 2021, hal ini dapat dilihat dari peningkatan hasil evaluasi atas

akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah yang mencakup 5 (lima) komponen besar yaitu manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja.

**Diagram 3.1**  
Perbandingan Nilai LAKIP Sekretariat Daerah



b. Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis diukur dengan menggunakan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai Sasaran Strategis yang telah diuraikan di atas, melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan

**Tabel 3.3**  
Pengukuran Indikator Kinerja Utama  
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Program

NO	Uraian	REALISASI KINERJA TAHUN 2022 (%)	TARGET TAHUN 2023 (%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2023 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90.20	100	92.11	91.89
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	37.49	85	105	123.52
3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	100
<b>Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program</b>		<b>75.90</b>	<b>95</b>	<b>99,18</b>	<b>104,40</b>

Dari table di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Realisasi Kinerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 yakni dari 75.90% menjadi 99,18%, hal ini menunjukkan adanya perbaikan terhadap kekurangan yang mungkin terjadi pada tahun sebelumnya. Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan 9 Bagian yakni Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Kepemimpinan, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan telah berkomitmen mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana prasarana yang memadai.

## 2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Capaian Program masing-masing dapat di lihat sebagai berikut:

### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja outcome program ini adalah Persentase Penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan target kinerja 100% dan realisasi kinerja sebesar 92,11%.

Faktor pendukung capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD, Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dimana kegiatan ini menghasilkan dokumen Perencanaan dan penganggaran serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Perencanaan dan Keuangan*.

Capaian Kinerja dari masing-masing sub kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah:

**Tabel 3.4**

Capaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100
2	Koordinasi dan penyusunan RKA SKPD	2 Dok	2 Dok	100
3	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	2 Dok	2 Dok	100
4	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	6 Dok	100
<i>Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi tepat waktu</i>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Tahun 2023

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan realisasi kinerja 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Perencanaan dan Keuangan*. Capaian Kinerja dari masing-masing subkegiatan yang berkontribusi pada kegiatan ini adalah sebagai berikut adalah:

**Tabel 3.5**

Capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah Tahun 2022

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang	80 Orang	97,56
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD	21 Kegiatan	21 Kegiatan	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	100
<i>Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah</i>		<b>100%</b>	<b>99,19%</b>	<b>99,19</b>

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Tahun 2023

- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah kegiatan ini mencakup penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD dengan realisasi kinerja 100% di mana indikator dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah sebanyak 4 Laporan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Perencanaan dan Keuangan*.
- d) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah kegiatan ini mencakup penatausahaan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan realisasi kinerja 100% di mana indikator dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah sebanyak 12 Dokumen. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Perencanaan dan Keuangan*.
- e) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini mencakup Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya, pengolahan dan pendataan kepegawaian Sekretariat Daerah, dan Bimbingan Teknis Perundang-undangan, dengan realisasi kinerja 104,16% Realisasi melampaui target untuk sub kegiatan Bimbingan Teknis. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*. Faktor pendukung capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah:

**Tabel 3.6**

## Capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	100
2	Bimbingan Teknis Perundang-undangan	24 Orang	26 Orang	108,33
<i>Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<b>100%</b>	<b>104%</b>	<b>104,16</b>

Sumber: Bagian Umum Setda Tahun 2023

- f) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Pada Kegiatan ini realisasi kinerja sebesar 99,46%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang Sangat Baik, adapun Kegiatan Fasilitas Kunjungan tamu bersifat disiapkan untuk tamu Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*. Capaian kinerja masing-masing subkegiatan yang mendukung Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah:

**Tabel 3.7**

Capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	9 Jenis	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	7 Jenis	100
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	3 Jenis	100
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 jenis	8 jenis	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis	8 Jenis	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1980 Eks	1980 Eks	100
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000 Orang	11.670 orang	97,25
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430 Kali	423 kali	98,37
<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<b>100%</b>	<b>99,46%</b>	<b>99,46%</b>

Sumber: Bagian Umum Setda Tahun 2023

- g) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 100% yang terdiri dari sub kegiatan Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya, pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*. Faktor pendukung capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

**Tabel 3.8**

Capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

## Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pengadaan Mebel	63 Unit	63 Unit	100
2	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	66 Unit	66 Unit	100
3	pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit	100
<i>Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan</i>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

- h) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 91,64% kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor hal ini disebabkan target untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tidak tercapai disebabkan terdapat kekosongan tenaga Upah Jasa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*. Faktor pendukung capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

**Tabel 3.9**

Capaian kegiatan Penyediaan Jasa  
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	6000 surat	5777 surat	96,28
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114 rek	114 rek	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 orang	38 orang	78,65
<i>Persentase Rata-rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>		<b>100%</b>	<b>91,64%</b>	<b>91,64</b>

- i) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi kinerja sebesar 82,50% Kurang optimanya realisasi disebabkan karena beberapa kendaraan membutuhkan biaya pemeliharaan melebihi batas pagu dalam SBU sehingga tidak dapat dilakukan pemeliharaan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*. Capaian kinerja masing-masing subkegiatan yang mendukung Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah:

**Tabel 3.10**

Capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45 Unit	27 Unit	60
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	2 Unit	100
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166 Unit	147 Unit	88,55
4	Pemeliharaan Meubel	74 Unit	72 Unit	97,30
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13 Unit	13 Unit	100
<i>Persentase Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik (%)</i>		<b>100%</b>	<b>82,50%</b>	<b>82,50</b>

- j) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Realisasi kinerja sebesar 68,75% hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan medical checkup KDH/WKDH Kurang optimal di mana Biaya Medical checkup yang disediakan untuk Wakil Bupati tidak digunakan dan hanya digunakan oleh Bupati. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*. Capaian Kinerja masing-masing subkegiatan yang mendukung pendukung capaian kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah adalah:

**Tabel 3.11**

Capaian kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	100
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16 pasang	16 pasang	100
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	50	50
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	100
<i>Persentase Laporan Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>		<b>100%</b>	<b>68,75</b>	<b>68,75</b>

- k) Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan realisasi kinerja sebesar 81,83%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Umum*. Faktor pendukung capaian kinerja Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah adalah:

**Tabel 3.12**  
Capaian kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah	3 Jenis	3 Jenis	100
2	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	3 Jenis	2 Jenis	66,67
3	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	5 Jenis	5 Jenis	100
<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rujab dan Mess</i>		<b>100%</b>	<b>81,83%</b>	<b>81,83</b>

- l) Kegiatan Penataan Organisasi dengan 2 (dua) Indikator yakni *Persentase OPD yang meningkat nilai SAKIP* dan Indikator *Persentase OPD yang menghasilkan inovasi pelayanan publik* masing-masing memiliki capaian kinerja dengan persentase capaian sebesar 82,05% dan 40,00%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub kegiatan yakni Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Organisasi*.

Subkegiatan yang mendukung pendukung capaian kinerja Penataan Organisasi adalah:

**Tabel 3.13**  
Capaian Kinerja Penataan Organisasi Tahun 2022

	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	41 OPD	41 OPD	100
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		15 OPD	4 OPD	40
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	39 OPD	39 OPD	100
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
<i>Persentase OPD yang meningkat nilai SAKIP</i>		<b>68,85%</b>	<b>82,05%</b>	<b>82,05</b>
<i>Persentase OPD yang menghasilkan inovasi pelayanan publik</i>		<b>53,33%</b>	<b>40%</b>	<b>75</b>

Sumber data : Bagian Organisasi SETDA Tahun 2023

Berikut data realisasi capaian kinerja Penataan Organisasi dari Tahun 2016 s/d 2023 pada Tabel berikut :

**Diagram 3.2**  
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Tahun 2016 s/d 2023



Sumber data : Bagian Organisasi SETDA Tahun 2023

**Diagram 3.3**  
Fasilitasi Peayanan Publik dan Tata Laksana Tahun 2017 s/d 2023



Sumber data: Bagian Organisasi Setda Tahun 2023

Survey Kepuasan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah 85,24 (Baik).

**Diagram 3.4**  
Nilai LAKIP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2023



Sumber data : Bagian Organisasi SETDA Tahun 2023

- m) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan realisasi kinerja kegiatan ini mencapai target 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan*.

**Tabel 3.14**

Capaian kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Fasilitasi Keprotokolan	252 keg	252 keg	100
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	252 keg	252 keg	100
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	252 keg	252 keg	100
<i>Jumlah Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang dihasilkan</i>		<b>756</b>	<b>756</b>	<b>100</b>

Sumber data : Bagian Prokopim SETDA Tahun 2023

## 2) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Indikator kinerja outcome program ini adalah Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dan

diaksanakan dengan target kinerja 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja dari Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 100%

Subkegiatan pendukung capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:

a) Kegiatan Administrasi tata Pemerintahan. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan capaian realisasi kinerja kegiatan 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Pemerintahan*.  
capaian kinerja dari masing-masing subkegiatan:

- Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan melakukan monitoring administrasi Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, memfasilitasi kasus-kasus pengaduan serta memfasilitasi penataan administrasi kelurahan dan kecamatan dengan target selama setahun 14, yang terdiri dari 11 kecamatan (Burau, Wotu, Angkona, Malili, Wasuponda, Nuha, Towuti, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana dan Kalaena) dan 3 Kelurahan (Kel.Malili, Kel.Magani dan Kel. Tomoni).
- Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan memfasilitasi penyediaan dokumen penegasan batas wilayah, yang fokus kerjanya di wilayah batas desa, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri 45 tahun 2016) terkait Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Target selama setahun sebanyak 25 Peta desa dan sebanyak 30 Peta desa telah dibuatkan Peraturan Bupati di Bagian Hukum yang terdiri atas 18 Desa di Kecamatan Burau, 6 Desa di Kecamatan Wotu, 3 Desa di Kecamatan Tomoni dan 3 Desa di Kecamatan Mangkutana.
- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, kegiatan ini merupakan subkegiatan yang memfasilitasi penyusunan dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal tahun 2022 dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022 melalui media online (Palopo.pos.) dan media cetak (surat kabar/koran). Pada tahun 2023, sebanyak 3 dokumen dan telah diselesaikan pada triwulan I dan II, sehingga untuk triwulan III dan IV, dilakukan melalui monitoring dan evaluasi LPPD, monitoring dan evaluasi SPM, reuvi EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) serta koordinasi dan supervisi terhadap laporan LPPD dan SPM.

**Tabel 3.15**

Capaian kinerja kegiatan Bagian Pemerintahan Setda Luwu Timur tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	11Kec/4 Kel.	11 Kec/4 Kel.	100
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	25 Peta	30 Peta	120
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100
<i>Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dikelola (Rekomendasi)</i>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Luwu Timur Tahun 2023

b) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat capaian kinerja 100% yang terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dan Pelaksanaan

Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Kesejahteraan Rakyat*.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spiritual merupakan subkegiatan yang memfasilitasi Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan, Pembinaan Keagamaan, Musabaqah Tilawatil Qura'an (MTQ), Pemberian Honorarium/Upah Rohaniawan/Petugas Keagamaan, Ibadah Haji, Apresiasi Wisata Religi Umrah 11 orang (Umat Islam), Wisata Rohani 7 orang (Umat Kristen) dan 5 Tirtayatra (Umat Hindu) serta Pemberian Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah sebanyak 74 tempat ibadah yakni 43 mesjid, 24 Gereja, dan 7 Pura.
- Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial merupakan subkegiatan yang memfasilitasi Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Luwu Timur yang Kurang Mampu sebanyak 300 orang dari berbagai Universitas.
- Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat merupakan subkegiatan yang memfasilitasi pemberian Beasiswa terhadap Mahasiswa Berprestasi dan Penyelesaian Studi jumlah Beasiswa berprestasi sebanyak 5215 orang dan Bantuan Penyelesaian Studi kepada 79 orang Mahasiswa S2 dan S3 serta pembinaan UKS.

Adapun capaian kinerja kegiatan bagian kesejahteraan rakyat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16**  
Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
3.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
	<i>Jumah Rekomendasi peaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan</i>	4	4	100

Sumber data : Bagian Kesra Setda Tahun 2023

Adapun Capaian Kinerja kegiatan dari 3 (tiga) subkegiatan dari Tahun 2017 s/d 2023 pada Tabel berikut :

**Tabel 3.17**

## Capaian Kinerja Output Kegiatan Bagian Kesra Setda Luwu Timur Tahun 2023

NO	KEGIATAN	TARGET							REALISASI						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendampingan Penyelenggaraan Ibadah Haji (orang)	160	160	172	0	160	150	180	157	160	159	0	0	74	179
2	Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan (kegiatan)	15	15	17	18	15	14	12	15	15	17	4	3	11	12
3	Pembinaan Kegiatan Keagamaan (kegiatan)	2	3	4	5	0	2	-	2	3	4	0	0	2	-
4	Apresiasi Wisata Religi	23	30	35	0	36	9	23	23	30	35	0	0	0	23
5	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ (orang)	-	60	-	58	-	58	-	-	60	-	52	0	52	-
6	Fasilitasi Pelaksanaan STQ	16	-	56	-	20	0	20	16	-	56	-	20	0	20
7	Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah	12	34	40	40	40	0	44	12	34	33	4	0	0	12
8	Dukungan Pembiayaan Operasional Petugas Keagamaan	1286	1354	1512	1514	1514	95	95	1286	1354	1512	1514	1514	95	95
9	Peningkatan Kapasitas Petugas Keagamaan	12	340	411	-	-	0	0	12	340	411	-	-	0	0
10	Bantuan Hibah Rumah Ibadah/Lembaga (Mesjid, Gereja Pura)	-	-	-	-	125	49	76	-	-	-	-	118	30	74
11	Beasiswa kepada Mahasiswa Kurang Mampu	-	-	-	-	-	725	400	-	-	-	-	-	635	300
12	Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi (orang)	-	-	-	-	-	5502	5618	-	-	-	-	-	5637	5215
13	Bantuan Penyelesaian Studi (orang)	-	-	-	-	-	15	720	-	-	-	-	-	24	79

Sumber data : Bagian Kesra SETDA Tahun 2023

- c) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,00%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Hukum*. Capaian kinerja masing-masing SubKegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Hukum Tahun 2023

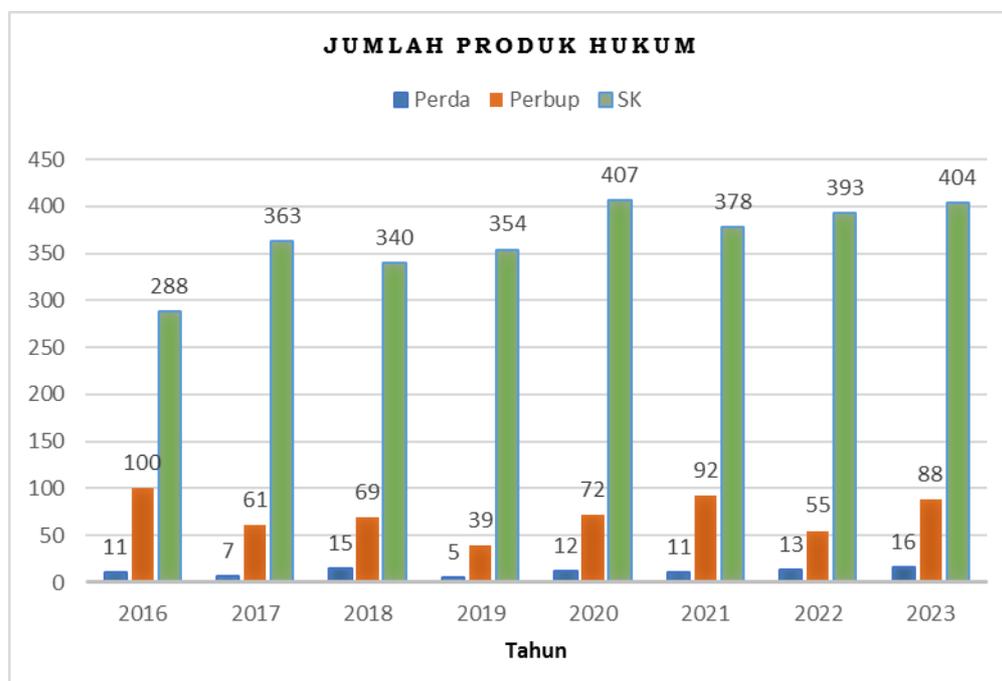
No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum (Produk Hukum)	17 Perda 88 Perbup 404 SK	16 Perda 88 Perbup 404 SK	99,80
2	Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4	4	100
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	16 Perda 88 Perbup 404 SK 11 Desa	16 Perda 88 Perbup 404 SK 11 Desa	100
<i>Persentase Koordinasi Hukum yang dilaksanakan</i>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,93</b>

Sumber: Bagian Hukum Setda Tahun 2023

Adapun capaian kinerja kegiatan bagian Hukum tahun 2016 s/d 2023 adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum  
Jumlah rancangan produk hukum daerah yang difasilitasi dan ditetapkan adalah sebagai berikut:

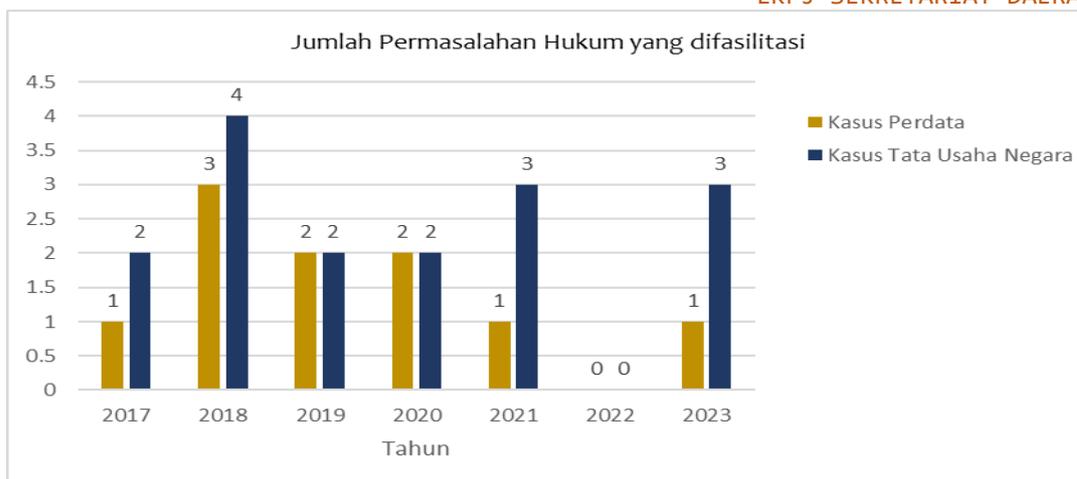
**Diagram 3.5**  
Realisasi Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah (2016-2023)



Sumber: Bagian Hukum Setda Tahun 2023

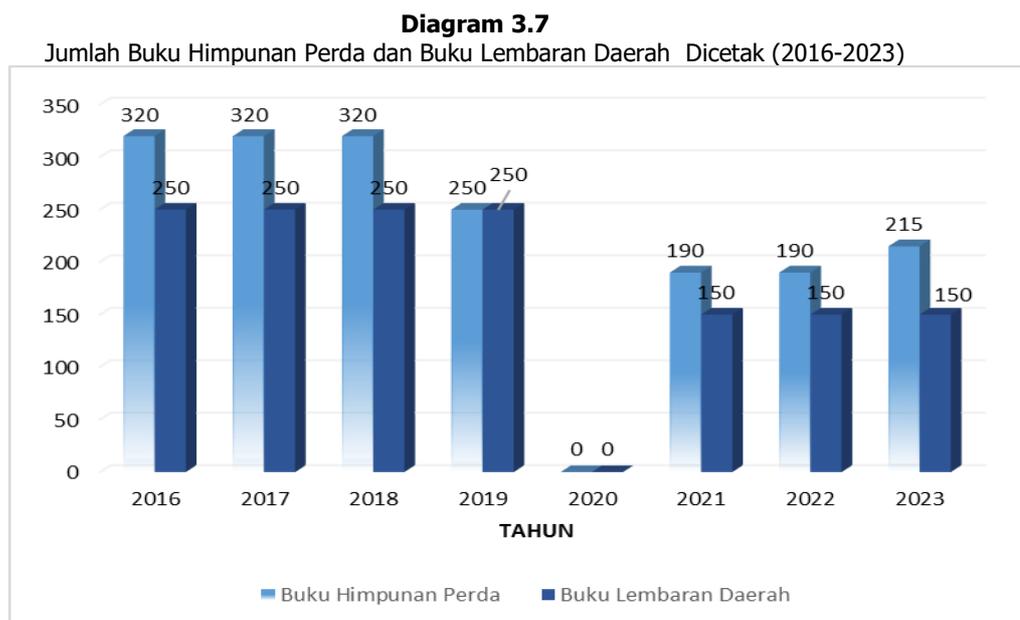
- Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dan Penyelesaian permasalahan hukum. Kegiatan ini untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara ataupun pidana di tahap penyelidikan dan penyidikan. Jumlah permasalahan hukum yang difasilitasi penyelesaiannya dari tahun 2017 s/d 2023 dapat dilihat pada gambar diagram sebagai berikut :

**Diagram 3.6**  
Jumlah Permasalahan Hukum yang Difasilitasi (2017-2023)



Sumber data: Bagian Hukum Setda Tahun 2023

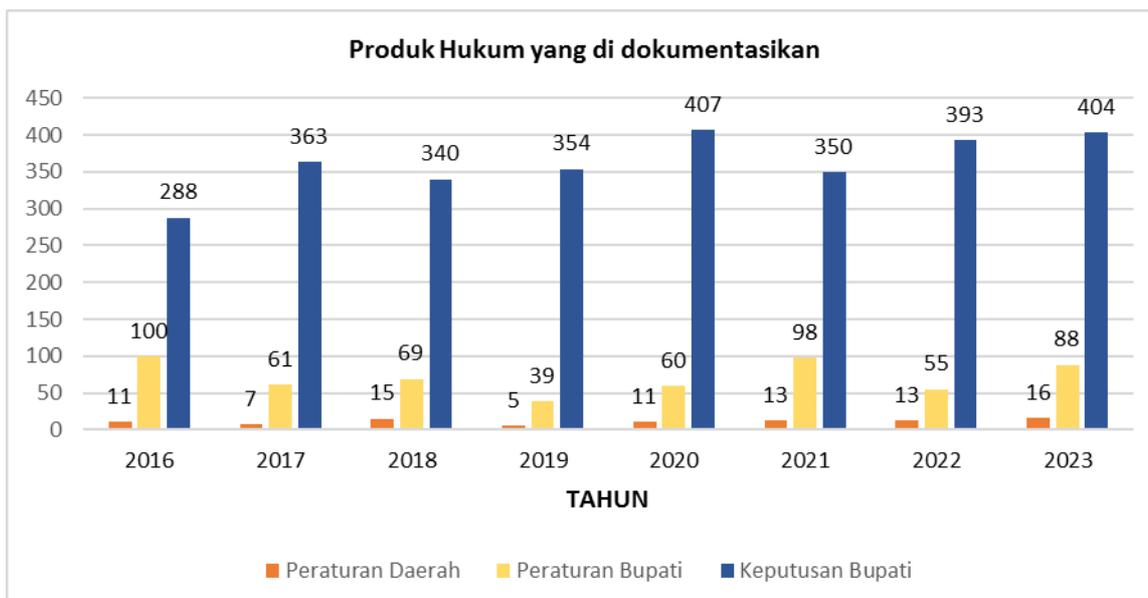
- Sub Kegiatan Pendokumentasin Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Kegiatan ini bertujuan mempublikasikan produk hukum yang telah ditetapkan. Publikasi dilakukan melalui website Luwu Timur di [jdih.luwutimurkab.go.id](http://jdih.luwutimurkab.go.id) dan juga melalui Buku himpunan Peraturan daerah yang disampaikan kepada Kepala desa lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Jumlah buku himpunan perda yang telah di cetak dapat dilihat pada diagram sebagai berikut :



Sumber data: Bagian Hukum Setda Tahun 2023

Capaian kinerja terkait jumlah produk hukum yang telah dipublikasikan dari tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

**Diagram 3.8**  
Pendokumentasian Produk Hukum (2016-2023)



Sumber data: *Bagian Hukum Setda Tahun 2023*

- d) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama. Kegiatan ini mencakup sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri yakni bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan Daerah lain atau Pihak lain. Capaian Realisasi pada kegiatan ini sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh *Bagian Pemerintahan*.

Capaian kinerja Kegiatan dari tahun 2018 s/d 2023 dapat dilihat pada diagram berikut :

- Subkegiatan Fasilitasi Kerjasama dalam Negeri, Subkegiatan ini merupakan kegiatan penyusunan kesepakatan bersama (Mou) dengan daerah lain dan dengan pihak ketiga, diantaranya kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Surakarta, Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Pihak ketiga BPJS Ketenagakerjaan.
- Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama, Subkegiatan ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi kerjasama dalam negeri. Output kegiatan ini adalah telah dilakukan evaluasi terkait kerjasama yang telah disepakati dengan evaluasi Perum Bulog, Save The Children dan perbankan (Bank Sulselbar, BRI dan BNI), Perjanjian Kerjasama Dukcapil dengan Instansi Pemda (Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial P3A, Dinas Penanaman Modal dan RSUD I Lagaligo) dan Universitas Hasanuddin terkait pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi yang kemudian menghasilkan output perpanjangan kesepakatan bersama serta perjanjian kerjasama terkait dana hibah abadi sebanyak 1 Milyar Rupiah.

**Tabel 3.19**  
Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Hukum Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Fasilitasi Kerjasama dalam negeri (MOU)	18 Mou	20 Mou	111,11
2	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	6 Mou	8 Mou	133,33
<i>Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi (PKS)</i>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>

Sumber: Bagian Hukum Setda Tahun 2023

**Diagram 3.9**

Kerjasama Tahun 2018 – 2023



Sumber Data: Bagian Pemerintahan Setda Tahun 2023

### 3) Program Perekonomian dan Pembangunan

Indikator kinerja outcome program ini adalah Persentase rekomendasi pembangunan Daerah dengan target kinerja 85% dan realisasi kinerja sebesar 109,29%.

- a) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian. Capaian Realisasi pada kegiatan ini sebesar 100%. Subkegiatan yang mendukung capaian kinerja kegiatan pelaksanaan kebijakan, perekonomian dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.20**

Capaian kinerja kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BUMD dan BLUD (Rekomendasi)	4	4	100
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Rekomendasi)	4	4	100
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil (Rekomendasi)	4	4	100
<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dihasilkan</i>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

Sumber: Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Luwu Timur Tahun 2023

- SubKegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD merupakan subkegiatan yang pelaksanaan kegiatannya menyangkut Evaluasi, Monitoring Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 4 BUMD dan satu Perseroda. Tahun 2023 ini Kabupaten Luwu Timur telah membentuk satu BUMD yakni PT.LUTIM GEMILANG dan sudah memiliki Akte Notaris dan SK Pengesahan dari Kemenkumham.
- Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dalam sub kegiatan ini ada Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Pelaksanaan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dalam pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah ini. Pada bulan Desember 2023 kabupaten luwu timur mencapai inflasi sebesar 2,21% yang mengikuti Laporan Badan Pusat Statistik Zona Palopo yang mencakup Beberapa Kabupaten kota yang berada di Luwu Raya. Dan selanjutnya dalam Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini Bagian Ekonomi dan Pembangunan adalah merupakan Koordinator bagi Beberapa SKPD yang mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang terdiri dari Kantor Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dinas Kesehatan selaku pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Tahun 2023 selain itu capaian berupa Rekomendasi SE Bupati Lutim tentang Antisipasi dampak Fenomena alam El-nino dan Rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil adalah Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang mana Sub Kegiatan ini mempunyai beberapa hal tentang Koordinasi yang berkaitan dengan Percepatan Akses Keuangan di Daerah (TPAKD) yang mana terdiri dari koordinasi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk lebih jelas terkait capaian kinerja Koordinasi pengendalian inflasi daerah dari tahun 2016 s/d 2023 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

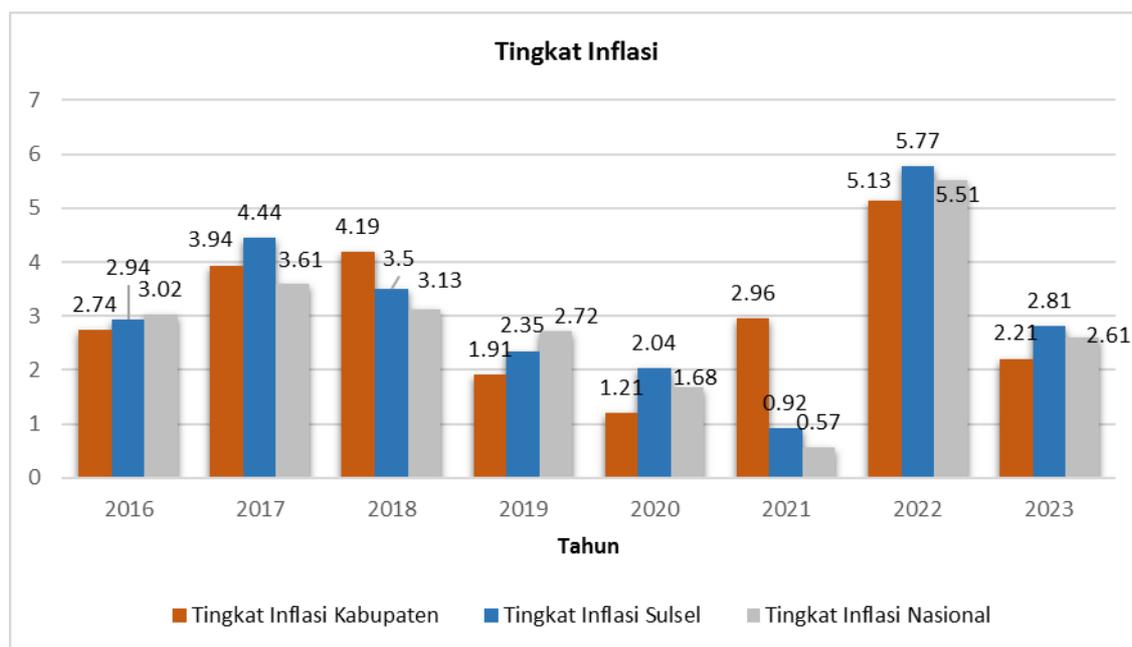
**Tabel 3.21**  
Perkembangan Inflasi Daerah Kurun 6 Tahun (2016-2022)

Tahun	Tingkat Inflasi Kabupaten	Tingkat Inflasi Sulsel	Tingkat Inflasi Nasional	Target Inflasi Nasional
2016	2,74	2,94	3,02	4±1%
2017	3,94	4,44	3,61	
2018	4,19	3,50	3,13	3,5±1%
2019	1,91	2,35	2,72	
2020	1,21	2,04	1,68	3,0±1%
2021	2,96	0,92	0,57	3,0±1%
2022	5,13	5,77	5,51	3,0±1%
2023	2,21	2,81	2,61	3,0±1%

Sumber data : Bagian Ekbang SETDA Tahun 2023

**Diagram 3.10**

## Perkembangan Inflasi Daerah Kurun 8 Tahun (2016-2023)



Capaian kinerja kegiatan Evaluasi Penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru sejak tahun 2019 terkait pelaku usaha UMKM yang memperoleh bantuan dari perbankan lewat aplikasi SIKP (sistem informasi kredit program).

**Tabel 3.22**

Perkembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Tahun 2019-2023

Tahun	Calon Debitur	Debitur
2019	1083	267
2020	1886	570
2021	1821	963
2022	1821	963
2023	1647	881

Sumber data : Bagian Perekonomian dan Pembangunan SETDA Tahun 2023

b) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Capaian realisasi kinerja 100%. Faktor yang mendukung capaian kinerja kegiatan pelaksanaan kebijakan, perekonomian adalah :

- Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Capaian realisasi kinerja sebesar 100% kegiatan ini mencakup realisasi serapan anggaran APBD 2023. Kegiatan ini bertujuan mengukur dan melaporkan realisasi serapan anggaran masing-masing SKPD dan secara umum mengetahui presentase realisasi serapan anggaran kabupaten Luwu Timur. Dan untuk tahun 2023 Persentase realisasi serapan Anggaran kabupaten Luwu Timur sebesar 94.67%.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan kegiatan ini mencakup Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik di Kabupaten Luwu Timur, dan untuk tahun 2023 berjumlah 884 kegiatan. Dengan rincian kegiatan pembangunan Fisik yang selesai sampai dengan 31 Desember 2023

teralisasi sebanyak 815 kegiatan atau sebesar 92,19%, kegiatan yang belum selesai dan pelaksanaannya tahun 2023 sebanyak 22 kegiatan atau sebesar 2,49% dan kegiatan yang batal sebanyak 4 kegiatan atau sebesar 0,45% terdapat di beberapa OPD yakni Dinas PU, Dinas Pariwisata dan RSUD I Lagaligo.

Capaian kinerja terkait realisasi serapan anggaran Kab. Luwu Timur dari tahun 2016 s/d 2023 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

**Tabel 3.23**  
Realisasi Penyerapan APBD Tahun (2016-2023)

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2016	1.553.764.811.738,00	1.340.482.311.019.61	86,27
2017	1.544.366.403.788,86	1.396.832.154.604,00	90,45
2018	1.594.487.428.669,95	1.521.586.750.535.37	95,43
2019	1.609.008.544.799,42	1.519.108.192.200.13	94,41
2020	1.484.283.786.932,78	1.424.193.813.767.05	95,95
2021	1.565.315.094.982,00	1.502.290.124.752,67	95,97
2022	1.724.113.886.050,00	1.671.257.743.867,76	96,93
2023	1.937.326.930.321,00	1.834.242.088.740,02	94,67

Sumber data : Bagian Perekonomian dan Pembangunan SETDA Tahun 2023

**Grafik 3.11**  
Realisasi APBD Kurun 6 Tahun (2016-2023)



Realisasi serapan anggaran APBD Kab. Luwu Timur Tahun 2023 sebesar Rp1.834.242.088.740,02 dari target Rp1.937.326.930.321,00 atau setara dengan 94,67%. Realisasi Belanja per bulan dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 3.12**  
Realisasi APBD Kab. Luwu Timur Tahun 2023



Sumber: Bagian Perekonomian dan pembangunan Setda Tahun 2023 (*Unaudited*)

c) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh *Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)* ini memiliki Capaian kinerja sebesar 109,29% faktor pendukung capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

- Sub kegiatan Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa, merupakan suatu kegiatan pemilihan penyedia dalam bentuk pelaksanaan tender dengan target 800 paket tender dan terealisasi sebanyak 1404 paket tender dan pengadaan langsung, yang mana jumlah paket tender yang dikelola telah melebihi target.
- Pengelolaan Layanan pengadaan secara Elektronik merupakan subkegiatan yang menangani layanan pengelolaan teknologi dan system informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja layanan pengadaan secara elektronik yang bersangkutan. Untuk tahun 2023 jumlah aplikasi yang pengelolaannya melalui LPSE sebanyak 7 aplikasi yakni SIRUP, SPSE, SIKAP, EKATALOG, LPSE SUPPORT, BELA PENGADAAN/TOKO DARING dan E-KONTRAK dan telah terintegrasi dalam aplikasi SIRUP dan beberapa aplikasi lainnya yang terintegrasi dengan SPSE.
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sub kegiatan yang memfasilitasi pembinaan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pengadaan serta pelaksanaan pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2023 telah terlaksana pembinaan bagi ASN berupa Bimbingan teknis PPK Tipe C.

**Tabel 3.24**

## Capaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	800 Paket	1404 Paket	175,50
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan jasa secara Elektronik	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100
3	Monitoring Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	61 Laporan	61 Laporan	100
Sumbu ePersentase Pengelolaan Pengadaan Barang r dan Jasa dilaksanakan		<b>100%</b>	<b>137%</b>	<b>137</b>

data: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023

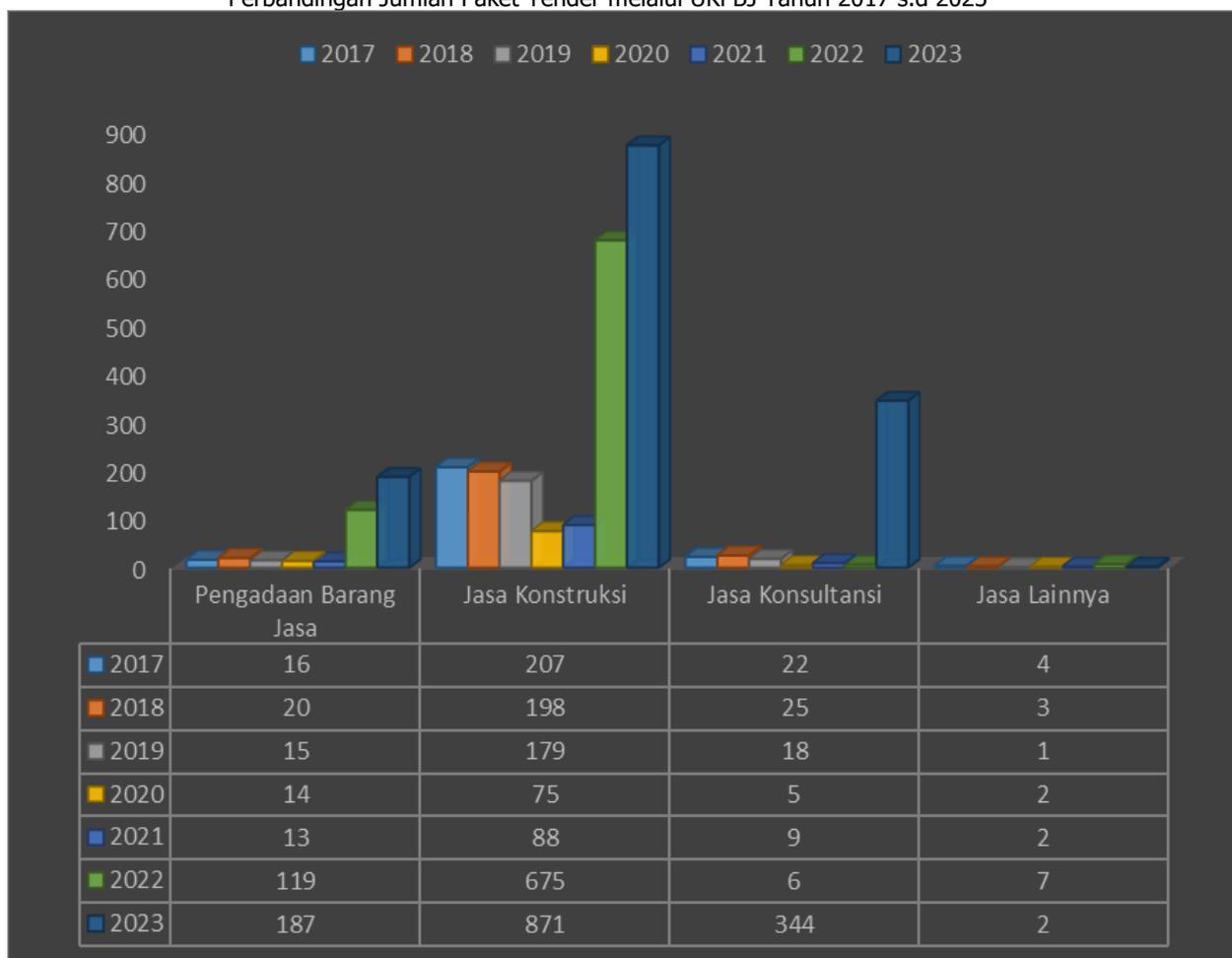
**Diagram 3.13**  
Jumlah Data Paket Tender yang Dikelola



Sumber data : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023

## Jumlah Paket Pengadaan yang Terealisasi

**Diagram 3.14**  
Perbandingan Jumlah Paket Tender melalui UKPBJ Tahun 2017 s.d 2023



Sumber data: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023

- d) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, kegiatan ini mencakup 2 (dua) subkegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan Capaian Kinerja sebesar 100%.

Rincian kedua subkegiatan ini sebagai berikut:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan adalah merupakan suatu Sub Kegiatan Capaian maksimal dengan output berupa Kegiatan dalam rangka melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) pada beberapa Perangkat Daerah pengampu.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah merupakan sub kegiatan Capaian maksimal dengan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi atas Minat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan 3 Blok WIUPK komoditas Nikel yang berada di Wilayah Kab. Luwu Timur pada Dinas ESDM Provinsi dan Kementerian ESDM.

**Tabel 3.25**

Capaian Kinerja Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Tahun 2023

<b>No</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
<b>1</b>	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100
<b>2</b>	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100
<i>Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan</i>		<b>8 Rekomendasi</b>	<b>8 Rekomendasi</b>	<b>100</b>

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.26**  
Pelaksanaan Urusan Penunjang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			15
4	Urusan Penunjang	Sekretariat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100%	92.11%	Persentase Program yang tidak maksimal disebabkan ada beberapa kegiatan tidak memenuhi target	Akan melakukan evaluasi dan perbaikan agar realisasi bisa dimaksimalkan.	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%	100%			
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dok	2 Dok	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen		
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dok	2 Dok	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen		
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2 Dok	2 Dok	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen		

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	6 Dok	6 Dok	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 6 Dokumen realisasi 6 Dokumen	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%	99.19%	Kurang optimalnya realisasi kinerja disebabkan adanya mutasi pegawai keluar ke OPD lain.	Seluruh PNS lingkup Sekretariat Daerah terbayarkan Gaji dan Tunjangannya.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	82 Orang	80 Orang	Kurang optimalnya realisasi kinerja disebabkan adanya mutasi pegawai keluar ke OPD lain.	Seluruh PNS lingkup Sekretariat Daerah terbayarkan Gaji dan Tunjangannya.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian, Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Kegiatan yang diverifikasi (Kegiatan)	21 Kegiatan	21 Kegiatan	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 21 Kegiatan realisasi 21 Kegiatan	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	14 Dok	14 Dok	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 14 dokumen realisasi 14 dokumen	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100%	100%			
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4 Dok	4 Dok	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 4 dokumen realisasi 4 dokumen		
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100%	100%		
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 12 laporan realisasi 12 laporan		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	104%			
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan penatausahaan barang penatausahaan barang yang disusun (Laporan) x	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 12 laporan realisasi 12 laporan		

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	24 Orang	26 Orang	Kegiatan ini sifatnya disediakan berdasarkan Undangan untuk mengikuti Bimtek. Capaian kinerja dari target 24 orang realisasi 26 orang	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100%	99.45%	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak tercapai maksimal disebabkan terdapat subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang sifatnya disediakan untuk tamu-tamu Pemerintah daerah.	Akan dilakukan Evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan penganggaran.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	9 Jenis	9 Jenis	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 9 Jenis realisasi 9 jenis komponen listrik	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	7 Jenis	7 Jenis	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 7 unit realisasi 7 unit peralatan kantor.	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Unit)	3 Jenis	3 Jenis	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 3 unit realisasi 3 unit peralatan rumah tangga	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	8 jenis	8 Jenis	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 8 jenis realisasi 8 jenis bahan logistik.	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	8 Jenis	8 Jenis	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 8 jenis realisasi 8 jenis barang cetakan dan penggandaan	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	1980 Eks	1980 Eks	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 1980 eksemplar realisasi 1980 eksemplar barang cetakan dan penggandaan	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	12000 Orang	11670 Orang	Realisasi kinerja tidak bisa diprediksi karena sifatnya disediakan untuk tamu-tamu Pemerintah Daerah..	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	430 Kali	423	Tidak ada masalah, kegiatan disediakan untuk memfasilitasi kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ASN. Capaian Kinerja maksimal dari target 430 realisasi 423 kegiatan rapat koordinasi	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	100%	100.00%			
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	63 Unit	63 Unit	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 63 unit realisasi 63 unit meubeler	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	66 Unit	66 Unit	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 66 unit realisasi 66 unit peralatan dan mesin	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	2 Unit	2 Unit	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 2 unit realisasi 2 unit bangunan gedung	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	91.64		
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	6000 Surat	5777 Surat	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 6000 surat realisasi 5777 surat, semua surat sudah melalui aplikasi Srikandi.	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	114 Rekening	114 Rekening	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 114 rekening realisasi 114 rekening.	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	48 Orang	38 Orang	Tidak tercapainya Kinerja disebabkan terdapat kekosongan 11 orang upah tenaga, beberapa diantaranya mengundurkan diri.	Akan dilakukan Koordinasi dengan BKPSDM untuk melakukan pergantian Upah jasa
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	100%	82.50%	Kurang Optimalnya Realisasi Kinerja disebabkan pada Subkegiatan Pemeliharaan Kendaraan, di mana terdapat Kendaraan yang membutuhkan biaya pemeliharaan melebihi batas pagu dalam SBU, dan pada Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang disediakan namun kondisi stabil.	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	45 Unit	27 Unit	Kurang optimalnya realisasi kinerja disebabkan beberapa kendaraan membutuhkan biaya pemeliharaan melebihi batas pagu dalam SBU sehingga tidak dapat dilakukan pemeliharaan.	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	3 Unit	2 Unit	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 3 unit realisasi 2 unit	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
			Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional						kendaraan.		
			Peningkatan Akuntabilitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	74 Unit	72 Unit	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 74 unit realisasi 72 unit Meubeler.		
			Peningkatan Akuntabilitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Pemeliharaan Meubel	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	166 Unit	147 Unit	Tidak optimalnya realisasi kinerja disebabkan beberapa peralatan dalam kondisi stabil dan tidak membutuhkan pemeliharaan.		
			Peningkatan Akuntabilitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	13 Unit	13 Unit	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 13 unit realisasi 13 unit gedung dilakukan pemeliharaan.		
			Peningkatan Akuntabilitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		Persentase Laporan Administrasi Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (%)	100%	68.75%	Tidak Optimalnya Realisasi Kinerja disebabkan pada Subkegiatan Medical Checkup tidak digunakan oleh Wakil Bupati dan sesuai ketentuan hal ini tidak bisa digunakan pada RS Swasta tetapi hanya pada RS Daerah.		
			Peningkatan Akuntabilitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH dan WKDH yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan (Orang)	2 Orang	2 Orang	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 2 orang realisasi 2 orang.		

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH/WKDH yang diadakan (Stel)	16 Pasang	16 Pasang	Capaian kinerja maksimal dari target 16 pasang realisasi 16 pasang.	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase medical check-up KDH dan WKDH yang terlaksana (%)	100	50	Kurang optimalnya realisasi kinerja disebabkan Wakil Bupati tidak melakukan medical check up dan hanya dilakukan oleh Bupati.	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 2 orang realisasi 2 orang.	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Rujab dan Mess (%)	<b>100</b>	<b>100</b>		
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah (Jenis)	3 Jenis	3 jenis	Capaian kinerja maksimal dari target 3 jenis realisasi 3 jenis.	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga wakil Kepala Daerah wakil Kepala Daerah	3 Jenis	2 Jenis	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 3 jenis realisasi 2 jenis.	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
			Peningkatan Akuntabilitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah dan Mess (Jenis)	5 jenis	5 Jenis	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 5 jenis realisasi 5 jenis.	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	Penataan Organisasi	Persentase OPD yang meningkat nilai saki (%) .	65.85%	82.05%			
					Persentase OPD yang menghasilkan Inovasi pelayanan publik (%)	53.33%	40%	Tidak optimalnya realisasi kinerja dari target 15 OPD realisasi 6 OPD disebabkan jumlah OPD yang telah menghasilkan inovasi adalah 6 OPD yakni tersaring adalah Puskesmas Bone Pute, Nuha, Angkona, Mangkutana, DPM PTSP, dan RSUD. Telah dilakukan penjangkaran dan pendampingan 3 Inovasi pelayanan publik tingkat OPD		
			Peningkatan Akuntabilitas Pengeolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (OPD)	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Penataan Kelembagaan (Perangkat Daerah)	41 OPD	41 OPD	Tidak ada masalah, Capaian Maksimal dengan Target 41 OPD Realisasi 41 OPD, output berupa penyusunan dokumen laporan evaluasi kelembagaan, Perda tentang Susunan Perangkat Daerah dan Penyusunan Dokumen SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) Perangkat Daerah.	Sebagai Pedoman Penataan Organisasi

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (OPD)	Jumlah Sosialisasi Tata Laksana yang Difasilitasi (Kegiatan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Capaian kinerja maksimal dari target 1 kegiatan realisasi 1 kegiatan.	Sebagai bahan peningkatan kualitas terhadap kepatuhan pelayanan Publik
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (OPD)	Jumlah OPD yang dibina dalam rangka menghasilkan inovasi pelayanan publik (Perangkat Daerah). Jumlah Sosialisasi Tata Laksana yang dilaksanakan (Kegiatan)	15 OPD	6 OPD	Tidak optimalnya realisasi kinerja dari target 15 OPD realisasi 6 OPD disebabkan jumlah OPD yang telah menghasilkan inovasi adalah 6 OPD yakni tersaring adalah Puskesmas Bone Pute, Nuha, Angkona, Mangkutana, DPM PTSP, dan RSUD. Telah dilakukan penjangkaran dan pendampingan 3 Inovasi pelayanan publik tingkat OPD	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (OPD)	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dalam rangka peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	39 OPD	39 OPD	Tidak ada masalah Capaian kinerja maksimal dari target 39 OPD laporan realisasi 39 OPD.	Perbaikan Rekomendasi Hasil Penilaian RB Internal Tahun 2023
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada masalah, Capaian maksimal dengan Output Dokumen IKM, Dokumen Laporan Hasil Penilaian. Capaian kinerja maksimal dari target 2 laporan realisasi 2 laporan.	Perbaikan terhadap kelemahan dan kekurangan Kualitas Pelayanan Publik.
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LAKIP pemerintah daerah yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 1 laporan realisasi 1 laporan.	Melakukan perbaikan Implementasi AKIP berdasarkan Rekomendasi LHE AKIP Tahun 2023

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Jumlah Keprotokoleran, komunikasi dan pendokumentasian pimpinan yang difasilitasi	756 Kegiatan	756 Kegiatan			
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan kedinasan KDH/WKDH yang difasilitasi	252 Kegiatan	252 Kegiatan	Tidak ada masalah, terkait pencapaian kinerja dan telah dilaksanakan fasilitas old camp dan rapat koordinasi evaluasi kinerja di sorowako	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	252 Kegiatan	252 Kegiatan	Tidak ada masalah terkait pencapaian kinerja, telah dilakukan pembahasan pada 34 desa yang diverifikasi sementara oleh BIG di Kementerian Dalam Negeri.	
			Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Aset dan Penyusunan Laporan Kinerja serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Aparatur melalui Pelatihan, Bimtek formal dan Fungsional		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah informasi kedinasan KDH/WKDH yang didokumentasikan/ dipublikasikan	252 Kegiatan	252 Kegiatan	Tidak ada masalah terkait pencapaian kinerja, telah dilakukan koordinasi terkait evaluasi e-SPM di Biro Pemerintahan dan studi tiru ke Kabupaten Soppeng.	
				<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		Persentase rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan	100%	100%		
				<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>		Jumlah Rekomendasi administrasi tata pemerintahan yang dihasilkan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi		
					Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang ditata administrasinya	11 Kel/4Kec.	11 Kec/4Kel.	Tidak ada masalah terkait pencapaian kinerja dan telah dilaksanakan fasilitas old camp dan rapat koordinasi evaluasi	Kegiatan yang akan dilaksanakan di awal tahun 2024 yakni Fasilitasi Kasus tanah one-one di Kecamatan

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
								kinerja di sorowako	Towiuti.	
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Peta yang dihasilkan	25 Peta	30 Peta	Tidak ada masalah terkait pencapaian kinerja, telah dilakukan pembahasan pada 34 desa yang diverifikasi sementara oleh BIG di Kementerian Dalam Negeri.	Menindaklanjuti hasil pembahasa evaluasi dan verifikasi oleh BIG
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan otonomi daerah yang difasilitasi	3 Laporan	3 Laporan	Tidak ada masalah terkait pencapaian kinerja, telah dilakukan koordinasi terkait evaluasi e-SPM di Biro Pemerintahan dan studi tiru ke Kabupaten Soppeng.	Meakukan evaluasi e-spm di aplikasi spm.bangda dan persiapan penyeenggaraan SPM Tahun 2024 dan penyusunan LPPD Tahun 2023.
					<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Jumlah Rekomendasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dihasilkan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi		
					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Hibah yang tidak realisasi pada rumah ibadah sebanyak 2 (dua) rumah ibadah yakni Masjid Darussalam desa Rantemario kec. Tomoni disebabkan berkas pengajuan pencairan tidak lengkap, dan Masjid Al Muhajirin desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena karena mendapatkan dana BKK di tahun yang sama.	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ	
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kegiatan kesejahteraan sosial yang dibina dan dievaluasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kurang optimalnya realisasi kinerja pembayaran beasiswa kurang mampu dari target 400 orang mahasiswa, terealisasi 300 orang disebabkan setelah dilakukan validasi kampus didapatkan informasi bahwa beberapa mahasiswa yang mendaftar terdaftar pada program Kampus Merdeka serta terdapat Mahasiswa yang tertolak karena berkas yang digunakan mendaftar adalah berkas yang tidak sah/dimanipulasi.	akan diupayakan untuk melakukan sosialisasi lebih awal kepada masyarakat sehingga informasinya akan persyaratan penerimaan Beasiswa bisa tersampaikan lebih maksimal lagi.	
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan kesejahteraan masyarakat yang dibina dan dievaluasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Dari Mahasiswa yang mendaftar dan tidak lulus verifikasi kendalanya adalah setelah dilakukan validasi kampus didapatkan informasi bahwa beberapa mahasiswa yang mendaftar terdaftar pada program Kampus merdeka serta terdapat Mahasiswa yang tertolak karena berkas yang digunakan mendaftar adalah berkas yang tidak sah/dimanipulasi.	akan diupayakan untuk melakukan sosialisasi lebih awal kepada masyarakat sehingga informasinya akan persyaratan penerimaan Beasiswa bisa tersampaikan lebih maksimal lagi.	
			Melaksanakan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun regulasi yang Implementatif di Daerah	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Persentase koordinasi hukum yang dilaksanakan (%)	100%	100				

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ	
			Melaksanakan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun regulasi yang Implementatif di Daerah			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan (Perda/Perbup/SK)	458 Produk Hukum	507 Produk Hukum	Capaian Kinerja dengan output berupa 507 dari jumlah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah sebanyak 508 dokumen produk hukum, terdapat 1 (satu) Rancangan Perda tentang Pencegahan Narkotika yang diajukan oleh Badan Kesbangpol yang belum selesai ditetapkan karena bergantung pada Agenda DPRD dalam melakukan pembahasan ranperda.	Meskipun Ranperda yang belum ditetapkan merupakan hal yang tidak dapat dihindari namun tetap perlu dikoordinasikan dengan Pimpinan DPRD agar kedepan lebih maksimal dengan tetap mempedomani prosedur dan waktu yang telah ditetapkan untuk pembahasan suatu ranperda.	
			Melaksanakan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun regulasi yang Implementatif di Daerah			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang didampingi melalui bantuan hukum (Kasus)	4 Kasus	4 Kasus	Perkara Pemerintah Daerah yang difasilitasi Bantuan Hukum selama Tahun 2023 adalah sebanyak 4 (empat) kasus masih tetap difasilitasi bahkan sampai ke tahun 2024. 2 (dua) sengketa ditingkat Kasasi Mahkamah Agung dan 2 (dua) sengketa masih berjalan di Pengadilan Pajak Jakarta, untuk agenda selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan akhir tanggal 16 Januari 2024. Dalam pencapaian Output Kinerja subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum agak sulit untuk diprediksi karena sangat	Telah dilakukan rapat pada awal tahun 2024 untuk penyusunan pendapat akhir sidang sengketa pajak. Untuk itu segera rampungkan bahan sidang yang akan disampaikan pada persidangan selanjutnya. Perlu upaya penanganan perkara agar Pemerintah Daerah dapat memenangkan sengketa.	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ	
								bergantung terhadap jadwal persidangan. Namun semua perkara telah difasilitasi sampai pada tahapan yang telah diagendakan.			
			Melaksanakan Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun regulasi yang Implementatif di Daerah		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan (Perda/Perbup/SK)	458 Produk Hukum	507 Produk Hukum	Capaian maksimal Output berupa pendokumentasian sebanyak 507 dokumen dari jumlah produk hukum yang ditetapkan seperti rincian: Perda sebanyak 16; Perbup 88 dan SK Bupati 403 serta Pembinaan Desa Sadar Hukum sebanyak 11 desa.	* Agar aplikasi JDih yang telah diperbaharui segera dilengkapi dengan seluruh produk hukum Daerah dan Informasi yang update: * Untuk tahun selanjutnya agar pendampingan terhadap desa/kelurahan yang didaftarkan untuk mengikuti omba desa sadar hukum lebih maksimal. Disarankan untuk melaksanakan omba desa sadar hukum tingkat Kabupaten.	
						Jumlah Desa Sadar Hukum	11 Desa	11 Desa			
				Fasilitasi Kerjasama Daerah		Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi (MOU)	60 PKS	60 PKS			

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
					Fasilitas Kerja Sama luar Negeri	Jumlah MOU Luar Negeri yang difasilitasi	18 MOU	20 MOU	Tidak ada masaah, Capaian kinerja maksimal dari target 18 Mou realisasi 20 Mou.	
					Evaluasi Peaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja sama yang dievaluasi	6 MOU	8 MOU	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 6 Mou realisasi 8 Mou.	
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase rekomendasi sektor perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti dan ditindaklanjuti dan (Rekomendasi)	<b>85%</b>	<b>105</b>			
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Jumlah rekomendasi kebijakan perekonomian yang dihasilkan (rekomendasi)	12 Rekomendasi	12 Rekomendasi			
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pegelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah rekomendasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang dihasilkan (rekomendasi)	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Capaian kinerja maksimal dari target 4 Rekomendasi realisasi 4 Rekomendasi namun Assesment tidak sempat dilaksanakan disebabkan karena Perda Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang, Akte Notaris, SK Pengesahan dari Kemenkumham ditetapkan di akhir tahun.	Assesment direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya.
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian dan distribusi perekonomian yang dihasilkan (rekomendasi)	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 4 Rekomendasi realisasi 4 Rekomendasi.	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil yang dihasilkan (rekomendasi)	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Capaian kinerja maksimal dari target 4 Rekomendasi realisasi 4 Rekomendasi.		
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		Jumlah rekomendasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang dihasilkan (rekomendasi)	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi			
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah rekomendasi Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi pembangunan (Rekomendasi)	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 4 Rekomendasi realisasi 4 Rekomendasi.		
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah rekomendasi pelaksanaan pembangunan fisik (Rekomendasi)	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 4 Rekomendasi realisasi 4 Rekomendasi.		
				<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (%)	100%	137.00%			
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang diproses oleh POKJA dan Pejabat Pengada (Paket)	800 Paket	1404 Paket	Kendala internal adalah masih kurangnya tenaga fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sedang faktor eksternal masih terdapat beberapa stekholder belum memahami proses PBJ khususnya dalam hal penyiapan dokumen pengadaan.	Melakukan evaluasi atas capaian Tahun 2023 serta berupaya meningkatkan kinerja Subkegiatan di Tahun 2024.	

**LKPJ SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Kode Urusan	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat daerah	Arah Kebijakan (Bab 5 Renstra)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Digital pendukung layanan pengadaan Barang dan Jasa yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah, Pelaku Usaha, dan UMK (aplikasi)	7 Aplikasi	7 Aplikasi	Pengetahuan serta pemahaman sebagian ASN pelaksana pengadaan di OPD masih kurang dalam memanfaatkan aplikasi pendukung E-Procurement	Melakukan evaluasi atas capaian Tahun 2023 serta berupaya meningkatkan kinerja Subkegiatan di Tahun 2024.	
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan pengadaan barang dan Jasa (Perangkat daerah)	61 opd	61 opd	Masih terdapat permasalahan yang berulang yang dilakukan ASN terkait pemahaman di bidang pengadaan barang/jasa khususnya pada pelaksanaan pemilihan penyedia	Melakukan evaluasi atas capaian Tahun 2023 serta berupaya meningkatkan kinerja Subkegiatan di Tahun 2024.	
					<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Jumlah Rekomendasi kebijakan Sumber Daya Alam yang dihasilkan (Rekomendasi)	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi			
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah rekomendasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dihasilkan (rekomendasi)	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 4 Rekomendasi realisasi 4 Rekomendasi.		
			Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan Monev terhadap kebijakan perekonomian daerah.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi kebijakan pertambangan dan lingkungan yang dihasilkan (Rekomendasi)	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	Tidak ada masalah, Capaian kinerja maksimal dari target 4 Rekomendasi realisasi 4 Rekomendasi.		

### 3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan Strategis merupakan suatu proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tersebut yang didasarkan pada siasat/kiat atau strategi tertentu. Ada tiga strategi dalam penyusunan kebijakan yaitu melalui perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Melalui penyusunan strategi kebijakan diharapkan dapat dicegah terjadinya penyimpangan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu agar kebijakan yang diambil menjadi sebuah solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi, maka perlu dirumuskan suatu strategi dalam penyusunan kebijakan tersebut.

**Tabel 3.27**  
**Kebijakan Strategis pada Urusan Penunjang\*\*)**

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemerintah Daerah menyediakan Law Firm Agus Melas and Parner sebagai Jasa Konsultan Hukum Pemerintah Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	1. Memberikan Layanan Konsultasi Hukum atas Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah; 2. Mendampingi penanganan perkara hukum Pemerintah Daerah sampai selesai
2.	Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023	Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.	Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia
3.	Penetapan Daftar Penerima Hibah pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.	1. Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana tempat Ibadah sehingga masyarakat untuk melaksanakan Ibadah.
4.	Penetapan Penerima Beasiswa Daerah Hasil Seleksi Tahun 2023	Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah	1. Untuk meningkatkan Akses dan Pemerataan Kesempatan Belajar di Perguruan Tinggi bagi Masyarakat Daerah; 2. Untuk membantu Mahasiswa Kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. 3. Untuk memberikan penghargaan dan Motivasi bagi Mahasiswa Berprestasi agar dapat meraih Prestasi yang lebih tinggi. 4. Untuk memberikan bantuan kepada Mahasiswa Daerah dalam pelaksanaan penelitian dalam

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			rangka tugas Akhir Pendidikannya.
5.	Penetapan Pengelola Gerakan Luwu Timur Jum'at Sedekah pada Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeolaan Zakat;</li> <li>2. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 13/VIII/Tahun 2021 tentang Penetapan Pengelola Gerakan Luwu Timur Jum'at Sedekah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.</li> </ol>	
6.	Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Luwu Timur.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Bersama antara MEnteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.</li> </ol>	Pembinaan dan Pengembangan UKS antar sector dan antar program.
7	Pembentukan Tim Legislasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan efektivitas penyusunan produk hukum daerah secara sistematis dan terkoordinasi untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas</li> <li>2. Menyediakan Kebijakan Daerah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.</li> </ol>
		Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah	
		Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023	

3.3 Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

**Tabel 3.28**  
**Realisasi Keuangan pada Urusan Penunjang\*\*)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN PERBAIKAN MASALAH
		PAGU	REALISASI	(%)		
1	2	4	6	7	12	12
				(6/5*100)		
5	BELANJA	84,909,694,397.00	79,027,645,800.19	93.07		
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32,481,262,197.00	30,286,816,445.19	93.24		
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196,508,600.00	190,634,252.00	97.01	Sisa Anggaran yang tersisa merupakan Belanja makan minum sisa pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang menyesuaikan dengan jumlah peserta rapat dan sisa hasil Negosiasi dari item belanja yang lain dan yang lainnya merupakan sisa hasil Negosiasi.	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,717,425,320.00	10,462,077,523.00	97.62	Sisa Anggaran merupakan sisa Honorarium UKPBJ dan Belanja Gaji tenaga Upah Jasa 1 (satu) orang selama 2 (dua) bulan yang tidak dibayarkan karena terangkat menjadi tenaga PPPK. Serta pada Subkegiatan Penyediaan Gaji di mana sisa Anggaran Gaji dan Tunjangan yang tidak realisasi berupa Anggaran disediakan untuk beberapa Jabatan Kosong yakni 1 orang Eselon III, Pejabat Eselon IV sebanyak 1 orang, Pejabat Fungsional 5 orang, dengan 2 orang staf dan sisa Tambahan Penghasilan dari potongan keterlambatan ASN.	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	126,433,200.00	124,208,230.00	98.24	Sisa Anggaran merupakan sisa hasil Negosiasi	
04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	35,040,000.00	34,794,230	99.30	Sisa Anggaran merupakan sisa hasil Negosiasi	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN PERBAIKAN MASALAH
		PAGU	REALISASI	(%)		
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185,571,585.00	156,647,677.00	84.41	Sisa Anggaran yang merupakan sisa belanja Asosiasi yang dibayarkan berdasarkan Invoice Porsedasi yang diterima dan merupakan sisa Belanja pada Penyediaan Bimtek berupa Biaya Kontribusi yang tidak digunakan karena beberapa kegiatan Bimtek yang diikuti menggunakan Biaya kontribusi dari OPD Pelaksana seperti Bimtek TAP oleh BKAD, Bimtek PPK Tipe C oleh Bagian PBJ yang sudah disediakan pada subkegiatan Pembinaan Advokasi Barang dan Jasa.	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,471,198,065.00	3,300,464,823.00	95.08	Sisa anggaran merupakan belanja tenaga upah kerja kelistrikan yang tidak terbayar karena sifatnya disediakan dan disebabkan Belanja Dekorasi dan Sewa Meja, Kursi dan Tenda, Sound System di Rujab (SewaTenda terowongan dan Sound System) yang tidak digunakan karena sifatnya disediakan untuk kegiatan atau acara Pemerintah Daerah serta yang lainnya adalah sisa hasil Negosiasi	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.
07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,173,672,646.00	6,117,141,981.00	99.08	Sisa Anggaran merupakan sisa hasil Negosiasi	
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,523,458,684.00	1,310,728,681.00	86.04	Tidak optimalnya penyerapan Anggaran disebabkan terdapat Belanja tenaga upah jasa yang tidak dibayarkan kepada 1 (satu) orang tenaga upah jasa tenaga administrasi umum selama 2 (dua) bulan karena terangkat menjadi PPPK dan terdapat pula kekosongan pada tenaga Upah Jasa yakni tenaga Cleaning service Kantor Bupati 1 orang, Tenaga Listrik 2 orang, tenaga Lapangan 1 orang, tenaga administrasi 7 orang.	Akan dilakukan Koordinasi dengan BKPSDM untuk melakukan pergantian Upah jasa
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,569,642,462.00	2,967,665,812.19	83.14	Kurang Optimalnya Realisasi Anggaran disebabkan oleh pengaturan batas pembiayaan pemeliharaan perunit kendaraan yang tidak bisa melebihi standar yang diatur dalam SBU sehingga beberapa kendaraan yang masih membutuhkan pemeliharaan tidak dapat dilakukan pemeliharaan selanjutnya, serta sisa anggaran termasuk disediakan untuk pemeliharaan LCD namun sampai saat ini belum membutuhkan pemeliharaan	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN PERBAIKAN MASALAH
		PAGU	REALISASI	(%)		
11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,912,183,213.00	2,427,235,503.00	83.35	Sisa Anggaran yang tersisa merupakan anggaran Gaji Wakil Bupati yang dianggrakan selama 5 (lima) bulan namun sesuai pelantikan tanggal 5 Oktober 2023 hanya dibayarkan selama 3 (tiga) bulan dan medical checkup yang tidak digunakan oleh Wakil Bupati dan Keluarga dalam hal ini biaya pemeriksaan baru digunakan oleh Bupati dan hanya 1 (satu) kali pemeriksaan serta Anggaran yang tersisa merupakan anggaran disediakan Belanja Perjalanan Dinas Bupati keluar negeri yang tidak realisasi.	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.
12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1,415,742,000.00	1,229,104,746.00	86.82	Kurang optimalnya realisasi disebabkan terdapat Kekosongan Pramusaji 4 orang dan tenaga Cleaning Service 3 orang serta merupakan sisa pembayaran biaya laundry, iuran keamanan dan dan iuran kebersihan pada Mess Pemda Jakarta dan Mess Pemda Makassar.	Akan dilakukan Koordinasi dengan BKPSDM untuk melakukan pergantian Upah jasa
13	Penataan Organisasi	1,117,363,300.00	1,110,123,144.00	99.35	Anggaran yang tersisa merupakan sisa hasil Negosiasi.	
14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1,037,023,122.00	855,989,843.00	82.54	Rendahnya Realisasi disebabkan Belanja tenaga keamanan / pengawalan yang untuk Pimpinan tidak digunakan karena terjadi perubahan mekanisme yang sebelumnya pengawalan berdasarkan permintaan Pimpinan namun dirubah untuk pengawalan rutin setiap harinya hanya saja setelah koordinasi dengan BPKP Sulawesi Selatan disarankan agar kembali dilakukan berdasarkan permintaan Pimpinan.	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.
<b>02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>50,048,357,547.00</b>	<b>46,632,364,819.00</b>	<b>93.17</b>		
01	Administrasi Tata Pemerintahan	447,379,100.00	428,311,801.00	95.74	Sisa Anggaran merupakan Belanja makan minum rapat yang disediakan untuk rapat fasilitasi penyelesaian kasus pengaduan dan merupakan Belanja makan minum rapat yang disediakan untuk rapat penegasan dan penetapan batas desa yang tidak digunakan seluruhnya karena berjalan dengan Lancar sehingga frekuensi rapat bisa dikurangi dibandingkan tahun sebelumnya yang pada beberapa segmen batas desa terkadang harus dibahas 3 (tiga) sampai 4 (kali) baru bisa mencapai kesepakatan.	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN PERBAIKAN MASALAH
		PAGU	REALISASI	(%)		
02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	48,557,432,547.00	45,227,713,996.00	93.14	Sisa anggaran Hibah yang tidak realisasi pada rumah ibadah sebanyak 2 (dua) rumah ibadah yakni Masjid Darussalam desa Rantemario kec. Tomoni disebabkan berkas pengajuan pencairan tidak lengkap, dan Masjid Al Muhajirin desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena karena mendapatkan dana BKK di tahun yang sama serta Sisa anggaran merupakan Belanja Beasiswa Berprestasi yang tidak realisasi dari target 5618 orang yang terealisasi sebanyak 5215, Sisa anggaran yang tidak digunakan disebabkan setelah dilakukan validasi kampus didapatkan informasi bahwa beberapa mahasiswa yang mendaftar terdaftar pada program Kampus merdeka serta terdapat Mahasiswa yang tertolak karena berkas yang digunakan mendaftar adalah berkas yang tidak sah/dimanipulasi pun terdapat sisa anggaran pembayaran Beasiswa kurang mampu sebanyak 100 orang dengan alasan data mahasiswa tertolak setelah dilakukan Validasi Kampus.	akan diupayakan untuk melakukan sosialisasi lebih awal kepada masyarakat sehingga informasinya akan persyaratan penerimaan Beasiswa bisa tersampaikan lebih maksimal lagi.
03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	964,204,000.00	897,750,522.00	93.11	Anggaran yang tidak terserap adalah anggaran yang disediakan untuk Jasa pendampingan Jaksa Pengacara Negara di mana jumlah orang yang ditrencanakan sebanyak 4 (empat) orang namun setiap pelaksanaan pendampingan hanya dihadiri 2 (dua) orang Jaksa dan lainnya Sisa Anggaran merupakan sisa hasil Negosiasi.	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.
04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	79,341,900.00	78,588,500.00	99.05	Sisa Anggaran merupakan Sisa hasil Negosiasi.	
<b>03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2,380,074,653.00</b>	<b>2,108,464,536.00</b>	<b>88.59</b>		
01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	678,571,806.00	426,098,586.00	62.79	Rendahnya Penyerapan anggaran disebabkan beberapa item kegiatan tidak dapat terlaksana karena Perda Pendirian BUMD PT. Lutim Gemilang, Akte Notaris, SK Pengesahan dari Kemenkumham ditetapkan di akhir tahun sehingga proses seleksi tidak dapat dilaksanakan dan lainnya merupakan sisa hasil Negosiasi.	Akan dilakukan perencanaan yang lebih cermat kedepannya.
02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	122,663,162.00	119,871,580.00	97.72	Sisa Anggaran merupakan Sisa hasil Negosiasi.	

NO.			PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERMASALAHAN/ KENDALA	SOLUSI DAN PERBAIKAN MASALAH
				PAGU	REALISASI	(%)		
	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,473,258,610.00	1,465,051,139.00	99.44	Sisa Anggaran merupakan Sisa hasil Negosiasi dan terdapat anggaran tenaga Upah Jasa 1 (satu) orang yang tidak dibayarkan karena meninggal dunia.	
	03		Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	105,581,075.00	97,443,231.00	92.29	Sisa Anggaran merupakan Sisa hasil Negosiasi	
<b>TOTAL BELANJA</b>				<b>84,909,694,397.00</b>	<b>79,027,645,800.19</b>	<b>93.07</b>		

### 3.4 Kerjasama Daerah

Mou adalah dokumen perjanjian resmi yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan pihak ketiga dalam hal ini difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan. Nota Kesepahaman merupakan kesepakatan antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti telah dapat dipastikan yang bertujuan untuk mengadakan hubungan hukum sebagai suatu surat yang dibuat oleh saah satu pihak yang isinya memuat kehendak, surat tersebut ditujukan kepada pihak lain dan berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat *letter of intent* yang sejenis untuk menunjukkan niatnya. Pada pihak yang bermaksud mengadakan nota kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Bentuk kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan lembaga-lembaga vertical maupun bidang pendidikan selama tahun 2023 dapat dilihat apada tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**KERJASAMA ANTAR DAERAH**

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
1	PEMDA LUWU TIMUR	UNIVERSITAS FAJAR	12-Jan-23	147.543/01/I/KSB/PEM-LT/2023 001/MOU-UNIFA/I/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN TRDIARMA PERGURUAN TINGGI
2	KOMINFO SP	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	24-Jan-23	900/07/SPK Kominfo-SP/2023 -	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEKERJAAN BELANJA JASA TENAGA AHLI (PENYUSUNAN SATU DATA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR) TAHUN ANGGARAN 2023
3	PEMDA LUWU TIMUR	UNIVERSITAS BOSOWA	7-Feb-23	147.543/02/II/KSB/PEM-LT/2023 271/13/Unibos/II/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN TRDIARMA PERGURUAN TINGGI
4	SEKRETARIAT DAERAH	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/05/II/KSB/PEM-LT/2023 039/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
5	DINAS PERIKANAN	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/06/II/KSB/PEM-LT/2023 040/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR
6	SEKRETARIAT DPRD	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/07/II/KSB/PEM-LT/2023 041/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/08/II/KSB/PEM-LT/2023 042/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
8	BAPEITBANGDA	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/09/II/KSB/PEM-LT/2023 043/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
9	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/10/II/KSB/PEM-LT/2023 044/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR
10	DPKPP	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/11/II/KSB/PEM-LT/2023 045/21H06/02/2023 045/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR
11	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/12/II/KSB/PEM-LT/2023 046/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR
12	DINAS PERHUBUNGAN	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/13/II/KSB/PEM-LT/2023 047/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR
13	DIKDUKCAPIL	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/14/II/KSB/PEM-LT/2023 048/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/15/II/KSB/PEM-LT/2023 049/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR
15	KECAMATAN BURAU	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/16/II/KSB/PEM-LT/2023 050/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
16	DINAS KESEHATAN	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/17/II/KSB/PEM-LT/2023 051/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
17	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/18/II/KSB/PEM-LT/2023 052/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMTAN KABUPATEN LUWU TIMUR
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/19/II/KSB/PEM-LT/2023 053/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LUWU TIMUR
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/20/II/KSB/PEM-LT/2023 054/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR
20	DINAS PENGENDAIAN PENDUDUK DAN KB	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/21/II/KSB/PEM-LT/2023 055/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU TIMUR
21	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/22/II/KSB/PEM-LT/2023 056/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
22	BKPSDM	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/23/II/KSB/PEM-LT/2023 057/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR
23	INSPEKTORAT	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/24/II/KSB/PEM-LT/2023 058/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
24	BKAD	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/25/II/KSB/PEM-LT/2023 059/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
25	DINAS PENDIDIKAN	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/26/II/KSB/PEM-LT/2023 060/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU TIMUR
26	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/27/II/KSB/PEM-LT/2023 061/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR
27	BADAN KESBANGPOL	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/28/II/KSB/PEM-LT/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR
28	SATPOLPP	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/29/II/KSB/PEM-LT/2023 063/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR
29	DISNAKERTRANS	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/30/II/KSB/PEM-LT/2023 064/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LUWU TIMUR
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/31/II/KSB/PEM-LT/2023 065/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR
31	BPBD	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/32/II/KSB/PEM-LT/2023 066/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
32	DPM PTSP	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/33/II/KSB/PEM-LT/2023 067/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR
33	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/34/II/KSB/PEM-LT/2023 068/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR
34	KECAMATAN MALILI	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/35/II/KSB/PEM-LT/2023 069/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
35	KECAMATAN ANGKONA	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/36/II/KSB/PEM-LT/2023 070/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR
36	KECAMATAN KALAENA	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/37/II/KSB/PEM-LT/2023 071/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR
37	KECAMATAN ANGKONA	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/38/II/KSB/PEM-LT/2023 072/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR
38	KECAMATAN TOWUTI	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/39/II/KSB/PEM-LT/2023 073/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR
39	KECAMATAN WASUPONDA	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/40/II/KSB/PEM-LT/2023 074/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR
40	KECAMATAN NUHA	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/41/II/KSB/PEM-LT/2023 075/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
41	KECAMATAN WOTU	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/42/II/KSB/PEM-LT/2023 076/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR
42	KECAMATAN MANGKUTANA	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/43/II/KSB/PEM-LT/2023 077/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR
43	RSUD I LAGALIGO	PERUM BULOG CABANG PALOPO	10-Feb-23	147.543/45/II/KSB/PEM-LT/2023 079/21H06/02/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMBELIAN DAN PENYALURAN BERAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH(RSUD) I LA GALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR
44	PEMDA LUWU TIMUR	PT VALE INDONESIA (TBK)	9-Mar-23	147.543/46/III/KSB/PEM-LT/2023 022/BAN-SM Prov/KS/II/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PROGRAM DUKUNGAN PENCAPAIAN TARGET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN MANDIRI TERFOKUS TAHUN 2023-2025 PADA WILAYAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSEROAN TERBATAS VALE INDONESIA TERBUKA DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
45	PEMDA LUWU TIMUR	PT VALE INDONESIA, TBK	9-Mar-23	147.543/47/III/PKS/PEM-LT/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PROGRAM INTEGRASI DUKUNGAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN MANDIRI TERFOKUS PADA WILAYAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSEROAN TERBATAS VALE INDONESIA TERBUKA DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
46	PEMDA LUWU TIMUR	YAYASAN SAVE THE CHILDREN INDONESIA	17-Apr-23	147.543/48/III/PKS/PEM-LT/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN SERTA KESEPAKATAN PEREMPUAN DAN ANAK
47	PEMDA LUWU TIMUR	BALAI BESAR METROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA WILAYAH VI MAKASSAR	11-May-23	147.543/59/PKS/PEM-LT/V/2023 T/HK.07.00/002/KBB4/V/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMANFAATAN INFORMASI DI BIDANG METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN LUWU TIMUR
48	PEMDA LUWU TIMUR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RSUD I LA GALIGO	29-May-23	400.12.4.4/217/DISDUKCAPIL 445/1920/RSUD-ILG	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMANFAATAN NIK, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP DALAM LINGKUP DINAS TERKAIT RSUD I LA GALIGO
49	PEMDA LUWU TIMUR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN DINAS PTSP	29-May-23	400.12.4.4/218/DISDUKCAPIL 000.4.7.1/140/DPMPSTP	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMANFAATAN NIK, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP DALAM LINGKUP DINAS TERKAIT DINAS PTSP

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
50	PEMDA LUWU TIMUR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN DINAS SOSIAL P3A	29-May-23	400.12.4.4/219/DISDUKCAPIL 400.9/570/DINSOS P3A	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMANFAATAN NIK, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP DALAM LINGKUP DINAS TERKAIT DINSOS P3A
51	PEMDA LUWU TIMUR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	29-May-23	400.12.4.4/220/DISDUKCAPIL 400.12.4.4/326/BAPENDA	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMANFAATAN NIK, DATA KEPENDUDUKAN DAN KTP DALAM LINGKUP DINAS TERKAIT BADAN PENDAPATAN DAERAH
52	PEMDA LUWU TIMUR	UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) PAULUS	13-Jun-23	147.543/49/VI/KSB/PEM-LT/2023 329/UKIP.02/A/VI/2023	KESEPAKATAN BERSAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
53	PEMDA LUWU TIMUR	INSTITUT BISNIS DAN KEUANGAN NITRO MAKASSAR	14-Jun-23	147.543/50/VI/KSB/PEM-LT/2023 351/K-1/IBKN/VI/2023	KESEPAKATAN BERSAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
54	PEMDA LUWU TIMUR	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	21-Jun-23	HK.03.01/1/2541/2023 147.543/51/VI/KSB/PEM-LT/2023	KESEPAKATAN BERSAMA PELAKSANAAN PELATIHAN TERAKREDITASI DI BIDANG KESEHATAN
55	BKPSDM	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	21-Jun-23	HK.03.01/1/2542/2023 893.5/638/V/BKPSDM/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELATIHAN TEKNOLOGI KONTRASEPSI TERKINI ATAU CONTRACEPTION TECHNOLOGU UPDTAE BAGI TENAGA KESEHATAN ANGKATAN I TAHUN 2023
56	BKPSDM	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	21-Jun-23	HK.03.01/1/2555/2023 893.5/639/VI/BKPSDM/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELATIHAN TEKNOLOGI KONTRASEPSI TERKINI ATAU CONTRACEPTION TECHNOLOGU UPDTAE BAGI TENAGA KESEHATAN ANGKATAN II TAHUN 2023
57	BKPSDM	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	21-Jun-23	HK.03.01/1/2556/2023 893.5/640/VI/BKPSDM/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELATIHAN TEKNOLOGI KONTRASEPSI TERKINI ATAU CONTRACEPTION TECHNOLOGU UPDTAE BAGI TENAGA KESEHATAN ANGKATAN III TAHUN 2023

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
58	PEMDA LUWU TIMUR	PT ASURANSI JASA INDONESIA	26-Jun-23	147.543/54/VI/KSB/PEM-LT/2023 010/508-1/VI/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG FASILITASI ASURANSI PERTANIAN
59	DISPKP	PT ASURANSI JASA INDONESIA	26-Jun-23	500.6/1841/DISPKP/2023 011/508-1/VI/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI
60	PEMDA LUWU TIMUR	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG	10-Jul-23	147.543/57/VIII/KSB/PEM-LT/2023 147./MOU/TKKSD-LS/1.04/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
61	PEMDA LUWU TIMUR	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG	10-Jul-23	147.543/55/VIII/KSB/PEM-LT/2023 03/MOU/TKKSD-LS/1.04/VII/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
62	PEMDA LUWU TIMUR	PEMERINTAH KAB LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG	10-Jul-23	147.543/58/VIII/PKS/PEM-LT/2023 9999/PKS/D.a.VI.08/2023	PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DI SATUAN PERMUKIMAN MAHALONA SKP C SP.1 KAWASAN TRANSMIGRASI MAHALONA, KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI SULAWESI SELATAN
63	PEMDA LUWU TIMUR	PEMERINTAH KAB LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG	10-Jul-23	147.543/58/VIII/PKS/PEM-LT/2023 9999/PKS/D.a.VI.08/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DEARAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR
64	PEMDA LUWU TIMUR	TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN LUWU TIMUR	21-Aug-23	147.543/85/KSB/PEM-LT/VIII/2023 121/Skr/PPK.LT/VIII/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAKSANAAN 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PKK
65	PEMDA LUWU TIMUR	PENGADILAN NEGERI MALILI	21-Aug-23	217/KPN.W22-U22/TI1.1/VIII/2023 147.543/92/KSB/PEM-LT/VIII/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYEDIAAN INOVASI LAYANAN PENGADILAN NEGERI MALILI GENERASI ONLINE

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
66	PEMDA LUWU TIMUR	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	22-Aug-23	147.543/91/PKS/PEM-LT/VIII/2023 -	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELAKSANAAN JASA TERA/TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) TIMBANGAN JEMBATAN
67	PEMDA LUWU TIMUR	PROVINSI SULAWESI SELATAN	28-Aug-23	147.543/93/KSB/PEM-LT/VIII/2023 -	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DI SULAWESI SELATAN
68	PEMDA LUWU TIMUR	KABUPATEN MESUJI, PROVINSI LAMPUNG	31-Aug-23	147.543/94/KSB/PEM-LT/VIII/2023 TM.00.02/...../I.01/MSJ/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
69	DISPKP	PEMERINTAH KAB MESUJI PROVINSI LAMPUNG	31-Aug-23	147.543/95/PKS/PEM-LT/VIII/2023 TM.00.02/..../I.01/MSJ/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DI SATUAN PERMUKIMAN MAHALONA SKP C SP.1 KAWASAN TRANSMIGRASI MAHALONA, KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI SULAWESI SELATAN
70	PEMDA LUWU TIMUR	KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN	31-Aug-23	147.543/89/KSB/PEM-LT/VIII/2023 137/11/PEM/SETDA/VII/2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN TERA-TERA ULANG TIMBANGAN JEMBATAN
71	PEMDA LUWU TIMUR	KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN	31-Aug-23	147.543/90/PKS/PEM-LT/VIII/2023 137/12/PEM/SETDA/VII/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELAKSANAAN JASA TERA/TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) TIMBANGAN JEMBATAN
72	PEMDA LUWU TIMUR	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT CABANG MALILI	18-Sep-23	147.543/96/PKS/PEM-LT/IX/2023 007/PKS-BSSB/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMAKAIAAN TANAH ASET DAERAH UNTUK LOKASI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
73	PEMDA LUWU TIMUR	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSEO) TBK KANTOR CABANG PALOPO	18-Sep-23	147.543/97/PKS/PEM-LT/IX/2023 PLP/2/0865/R	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMAKAIAAN TANAH ASET DAERAH UNTUK LOKASI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
74	DISDAKOP	PENGUSAHA BAPAK ARIF ARAS, SE	1-Oct-23	510/611/PK/DAGKOP-UKMP/X/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMAKAIAAN ASET DAERAH BANGUNAN LANTAI DUA DI PASAR MALINDUNGI, DESA NIKKEL, KECAMATAN NUHA
75	PEMDA LUWU TIMUR	PT.RUSKY AERO INDONESIA	4-Oct-23	147.543/99/KSB/PEM-LT/X/2023 ...2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYEDIAAN AKSESIBILITAS ANGKUTAN KARGO EKSPOR UDARA SECARA LANGSUNG FLIGHT DIRECT) DARI MAKASSAR KE LUAR NEGERI
76	PEMDA LUWU TIMUR	KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH	13-Oct-23	147.543/100/KSB/PEM-LT/X/2023 /2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
77	PEMDA LUWU TIMUR	KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH	13-Oct-23	147.543/101/PKS/PEM-LT/X/2023 TM.00.02/..../I.01/MSJ/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DI SATUAN PERMUKIMAN MAHALONA SKP C SP.1 KAWASAN TRANSMIGRASI MAHALONA, KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI SULAWESI SELATAN
78	PEMDA LUWU TIMUR	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSEO) TBK KANTOR CABANG MASAMBA	20-Oct-23	147.543/104/PKS/PEM-LT/X/2023 /086 B.1277/KC/XIII/LOG/10/2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PEMAKAIAAN TANAH ASET DAERAH UNTUK LOKASI ANJUNGAN TUNAI MANDIRI
79	PEMDA LUWU TIMUR	BPJS KETENAGAKERJAAN	31-Oct-23	147.543/102/KSB/PEM-LT/X/2023 /2023	KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA UPAH JASA DAN PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR
80	PEMDA LUWU TIMUR	BPJS KETENAGAKERJAAN	31-Oct-23	147.543/103/PKS/PEM-LT/X/2023 /2023	PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DATA PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN LUWU TIMUR
81	PEMDA LUWU TIMUR	UNIVERSITAS HASANUDDIN	6-Nov-23	147.543/106/PKS/PEM-LT/XI/2023 38876/UN4.1.2/HK.07/2023	PEMBERIAN DANA HIBAH ABADI

No	PERANGKAT DAERAH	INSTANSI MITRA MOU/KERJASAMA	TANGGAL MOU/KERJASAMA	NOMOR MOU/KERJASAMA	PERIHAL MOU/KERJASAMA
82	PEMDA LUWU TIMUR	KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT	21-Dec-23	323/KI.03.01/XII/2023 147.543/108/KSB/PEM-LT/XII/2023	HIBAH APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
83	PEMDA LUWU TIMUR	KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT	21-Dec-23	324/KI.03.01/XII/2023 147.543/108/KSB/PEM-LT/XII/2023	PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
84	PEMDA LUWU TIMUR	KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH	19-Oct-23	147.543/101/PKS/PEM-LT/X/2023 TR.00/3083/2023	TERKAIT PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DI SATUAN PERMUKIMAN MAHALONA SKP C SP.1 KAWASAN TRANSMIGRASI MAHALONA, KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI SULAWESI SELATAN
85	PEMDA LUWU TIMUR	Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur	21-Aug-23	147.543/85/KSB/PEM-LT/VIII/2023 121/Skr/PKK.LT/VIII/2023	KERJASAMA DI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
86	PEMDA LUWU TIMUR	Yayasan Save The Children Indonesia	31/11/2022	147.543/71/KSB/PEM-LT/XI/2023 060.MOU.YSTC.I.2023	KERJASAMA DI BIDANG SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
87	PEMDA LUWU TIMUR	Kejaksaan Negeri Luwu Timur	31-Aug-23	147.543/92/KSB/PEM-LT/VIII/2023 B-02/P.4.58/Gs.2/08/2023	LAYANAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
88	PEMDA LUWU TIMUR	Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat	21-Dec-23	147.543/107/KSB/PEM-LT/XII/2023 B203	KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH
89	PEMDA LUWU TIMUR	Universitas Hasanuddin	5-Jul-23	147.543/13/KSB/PEM-LT/VII/2023 20425/UN4.1/HK.07/2023	KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sumber : Bagian Pemerintahan Tahun 2023

### 3.5 PENGHARGAAN

Adapun Penghargaan yang diterima Sekretariat Daerah selama Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.27**  
Penghargaan yang diterima Sekretariat Daerah

NO	SKPD	Nama Penghargaan	Partisipasi dalam Bidang	Pemberi Penghargaan
1	Bagian Organisasi	Top Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulsel 2023	Pelayanan Publik	Provinsi Sulawesi Selatan
2	Bagian Organisasi	Penghargaan Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori B Zona Hijau dengan Nilai 83,24	Pelayanan Publik	Ombudsman
3	Bagian Organisasi	Indeks Implementasi Berakhlak survey Budaya Kerja ASN Kab.Luwu Timur Tahun 2023	Bidang Reformasi Birokrasi	Kementrian PANRB
4	Bagian Organisasi	Peningkatan Nilai SAKIP dari Tahun 2022 Nilai 64,26 Tahun 2023 menjadi Nilai 66,25 Predikat B	Bidang Akuntabilitas Kinerja	Kementrian PANRB
5	Bagian Hukum	Nilai Indeks Reformasi Hukum 2023 Kategori BB meningkat dari Tahun 2022, Nilai 50,35 (C) menjadi 78,39 (BB)	Partisipasi dalam Bidang Hukum	Kemenkum HAM
6	Bagian Hukum	Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2023 dengan Nilai 74,00 Kategori DWITUNGGGA Urutan ke2 Sulawesi Selatan setelah Kota Pare-pare.	Hukum	Kemenkum HAM
7	Bagian Hukum	Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023, dengan predikat PEDULI (98,13)	Hukum dan HAM	Kemenkum HAM

Malili, 27 Januari 2024

**Sekretaris Daerah**



**Drs. H. BAHRI SULI, MM**

Pangkat: Pembina Utama Madya

NIP. 19660620 198603 1 007

